PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI BALI
DINAS KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2015

Nomor : [illegible]
Tanggal : [illegible]

Melestarikan WARISAN BUDAYA

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. [illegible] TELP. [illegible] FAX. [illegible]
email : [illegible] website : [illegible]
PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2021 berupa Pernyataan Review atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

Review dimaksud untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat review atau hal-hal yang menimbulkan keraguan dalam mengakui kesesuaian informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Pekanbaru, 27 Februari 2022
PIT. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

JONRA JENAPUTRA MAURISNO, SE,MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. [illegible]

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya kesumbar ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmatNya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja tahun 2016. Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sengaja pengukuran dalam akuntabilitas kinerja dan pemerintah kewajiban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusun Rencana Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang kebudayaan. Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja tahun 2016 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, telah sepenuh kinerja tahun 2016 yang laporan juga dilengkapi dengan analisis capaian pencapaian tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Tahun 2016 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 4 (empat) program pembangunan kebudayaan. Adalah berjalan lancar dan dukungan internal pemangku kepentingan, secara umum Dinas Kebudayaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan kinerja dengan baik. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau salah mendapat telah banyak capaian yang dikualifikasi, namun tantangan pembangunan di bidang kebudayaan masih banyak bahkan memerlukan kerja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pekanbaru, [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENGANTAR 1

BAB II [illegible] 10

BAB III [illegible] 17

BAB IV [illegible] 9

DAFTAR GAMBAR 10

DAFTAR LAMPIRAN [illegible]

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 7

1.3 Tugas dan Fungsi 12

1.4 Aspek Strategis Dinas Kebudayaan 18

1.5 Permasalahan utama 22

1.6 Profil Sarpras dan Jaringan "Real" Provinsi Riau Tahun 2024 22

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

2.1 Arsiran Strategis Dinas Kebudayaan 26

2.2 Perjanjian Kinerja 29

2.3 Arsiran Anggaran Tahun Anggaran 2025 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

A. Capaian Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 23

B. Realisasi Anggaran 33

BAB IV PENUTUP 34

4.1 Kesimpulan 37

4.2 Langkah Strategis 38

DAFTAR TABEL

Tabel
Halaman

[illegible] Rincian Tambahan/Kurang Berasal dari Kabupaten/Kota Tahunan ..... [illegible]

[illegible] Klasifikasi Pegawai Menurut Usia ..... [illegible]

[illegible] Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan ..... [illegible]

[illegible] Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan Formal ..... [illegible]

[illegible] Klasifikasi Pegawai Fungsional Tertentu ..... [illegible]

[illegible] Klasifikasi Tenaga Pendukung/Non PNS ..... [illegible]

[illegible] Tujuan, sasaran dan indikator Urusan Kebudayaan Provinsi Riau ..... [illegible]

[illegible] Rencana pengeluaran energi dan arah kebijakan ..... [illegible]

[illegible] Keyakinan ekonomi tahun 2021 ..... [illegible]

[illegible] Data Situs Peninggalan Jaya ..... [illegible]

[illegible] Tujuan Urusan Pemerintah Bidang Budaya Riau yang Ditindaklanjuti ..... [illegible]

[illegible] Urusan Pemerintah Bidang Budaya Riau yang Ditindaklanjuti ..... [illegible]

[illegible] Tujuan indikator dan sasaran Budaya ..... [illegible]

[illegible] Rencana Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Urusan Budaya ..... [illegible]

[illegible] Tujuan Indikator dan Sasaran Budaya ..... [illegible]

[illegible] Rencana Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Urusan Budaya ..... [illegible]

[illegible] Tujuan Indikator dan Sasaran ..... [illegible]

[illegible] Rencana Hasil Evaluasi Tahun [illegible] dan [illegible] ..... [illegible]

[illegible] Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun [illegible] ..... [illegible]

[illegible] Realisasi Anggaran ..... [illegible]

[illegible] Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun [illegible] ..... [illegible]

[illegible] Realisasi Belanja Anggaran [illegible] Tahun [illegible] ..... [illegible]

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh 3

1.2 Struktur Organisasi BPT Museum Dayah Tiro Sinoe Ace Tonoh Kuliyo 4

DAFTAR GRAFIK

Grafik

Halaman

3.1 Perkembangan Realisasi Belanja Indikator Nilai Capaian Belanja Dengan Tingkat Nasional 29

3.2 Perkembangan Realisasi Belanja Indikator Nilai Capaian Belanja Dengan Tingkat Nasional 32

3.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2021 38

3.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Hasil Pengitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022
3. Formulir Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Tahun 2022
4. Formulir Rencana Kinerja Tahunan PK Dinas Kebudayaan Tahun 2022
5. Formulir Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
6. Formulir Pohon Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
7. Formulir Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
8. Formulir Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamatkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai akuntabilitas Aparat Pemerintah yang baik, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau selaku aparat pemerintah, pengelola, dituntut untuk melaksanakan pembangunan kinerja. Pembangunan kinerja dilangsung secara terus menerus dalam jangka waktu dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya menemukan inovasi-inovasi mutakhir.

Pembangunan kebudayaan dilanggarkan dalam rangka peningkatan nilai budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas SDMp, sementara aspirasi kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamikat multi kemajuan, kemajuan, berbudaya dan berdasar secara kemanusiaan dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Pembangunanya dipertimbangkan yang baik, benar, dan berwibawa mengacuan pragmatis bagi sikap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bersangara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan lengkapnya upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksanakan secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta taat dan tunduk, taat dan patuh.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan otonomi merupakan tuntutan semua pihak. Berkaitan tuntutan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan lengkapnya sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggungjawab serta taat dan tunduk, taat dan patuh (KKN) Peraturan Presiden RI.LP Tahun 2004 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem taat atau patuh dalam undang undang tersebut menyatakan tuntutan semua penyelenggaraan negara maupun kepatuhan hukum, arti tertib penyelenggaraan negara, arti kepentingan umum, arti keterbukaan, arti proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas dan akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dan pencapaian kinerja hasil nyata pencapaian sasaran kinerja secara dan usaha dengan target yang telah ditetapkan.

1.1 Sejarah Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

A. Sejarahnya

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2018 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dirumuskan pada tanggal 17 Februari 2017 sesuai dengan perkembangan

pasukan Penertib Busana Muda dibidang penyusunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pelaksanaan Tugas Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Kebudayaan**

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan urusan pemerintahan Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang meliputi Kesenangan Daerah untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan penyusunan kebijakan Pembelanjaan, Bidang Sekolah dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Sekolah dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Sekolah dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya;
4. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Sekolah dan Seni, Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait penyusunan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik

daerah, serta kepegawaian dan umum, untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi, perumusan dan pelayanan administrasi dalam penyiapan, penyusunan dan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Evaluasi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan;
2. Penyusunan dan pemantauan pelaksanaan standar operasional prosedur pemrograman program, keuangan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta kepegawaian dan umum;
3. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah kepegawaian dan umum;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemrograman program keuangan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah kepegawaian dan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh pelaksana Pengurusan dan Kelompok Jabatan Fungsional

B. Bidang Budaya dan Seni

Bidang Budaya dan Seni menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Budaya dan seni, kesenian, dan seni media. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang budaya dan seni menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, perumusan, pengaturan dan pengembangan rencana program kegiatan dan anggaran pada bidang budaya dan seni;
2. Penyusunan dan pemantauan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Budaya dan Seni;
3. Koordinasi tugas pendistribusian kepada bawahan pada Bidang Budaya dan Seni;

4. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang adat dan dan dengan pemerintah daerah terkait;
5. melaksanakan upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya manusia, kelembagaan dan Objek Kemajuan kebudayaan pada bidang adat dan dan;
6. melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan monitoring laporan pelaksanaan supervisi dan laporan pada bidang adat dan dan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas kepala bidang Adat dan dan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya

Bidang Pelestarian adat dan nilai Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pelestarian adat dan Tradisi, Nilai Budaya, Pewarisan dan Dokumentasi Budaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, pengurusan dan pengembangan rencana program, kegiatan dan anggaran pada bidang Pelestarian Adat dan nilai Budaya;
2. melaksanakan upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sumber Daya Manusia, kelembagaan dan Objek pencapaian kebudayaan pada bidang pelestarian adat dan nilai budaya;
3. Membagi tugas, pendelegasian kepada bawahan pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
4. Penyusunan dan pemberian pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pelestarian adat dan nilai Budaya;
5. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelestarian adat dan nilai Budaya dengan perangkat daerah terkait;
6. Fasilitasi dan koordinasi proses pengakuan, penegasan tentang budaya asli lokal di tingkat nasional dan internasional;

f. melaksanakan pembinaan administrasi kebudayaan, sarana dan masyarakat adat yang meliputi dan berhubungan dengan urusan Pariwisata;
g. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan;
h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan lapangan pada bidang kebudayaan adat dan nilai budaya; dan
i. melaksanakan tugas kebinasaan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, kepala bidang kebudayaan adat dan nilai budaya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

1. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan tugas yang berkait dengan sejarah, pelestarian cagar budaya, dan permuseuman. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

1. Penggalian, penyusunan, perumusan dan pengembangan rencana program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Penyusunan dan penetapan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Pemberian tugas pendelegasian kepada bawahan pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
4. Pemberian Rekomendasi pemanfaatan Cagar Budaya tidak bergerak Pemerintah;
5. Pemberian Rekomendasi berkait sertifikasi pada Objek Cagar Budaya Tingkat Pemerintah;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan konsep penetapan kebijakan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan perangkat daerah terkait;

i. melaksanakan dan/atau mendukung upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai luhur budaya, cagar budaya dan permuseuman;
k. melaksanakan dan/atau mendukung [illegible] cagar Budaya tingkat Provinsi;
l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Sejarah, Kebudayaan cagar budaya dan permuseuman; dan
m. melaksanakan tugas lainnya lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Selain pelaksanaan tugas, tugas di Bidang Sejarah, Kebudayaan cagar Budaya dan Permuseuman dikerja oleh sebagai jabatan fungsional.

e. Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya

Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya menyelenggarakan tugas yang terkait dengan diplomasi budaya, pengembangan kerjasama budaya, publikasi dan promosi budaya. Untuk melaksanakan tugas Bidang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan, penyusunan, pengadaan dan pengembangan rencana program,kegiatan dan anggaran pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
2. Penyusunan dan penetapan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan penyusunan kebijakan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dengan perangkat daerah terkait;
4. Melaksanakan pengadaan Publikasi, Pendokumentasian, Promosi dan Pengembangan Teknologi Budaya Bangsa Pro pada Dinas Kebudayaan;
5. Melaksanakan Diplomasi Budaya Dalam dan Luar Negeri;
6. Melaksanakan Pembinaan Budaya terkait pendaftar Anggaran Kebudayaan;

f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pelaporan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1. **UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya**

UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan di bidang Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya. Untuk melaksanakan tugas, UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Kelompok Tata Usaha, Sub Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Sub Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kelompok Tata Usaha, Sub Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Sub Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Kelompok Tata Usaha, Sub Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Sub Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya;
4. Penyelenggaraan pelayanan Sub Pengelola dan Pengembangan Museum Sang Nila Utama dan Sub Pengelola dan Pengembangan Taman Budaya; dan
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi [illegible]

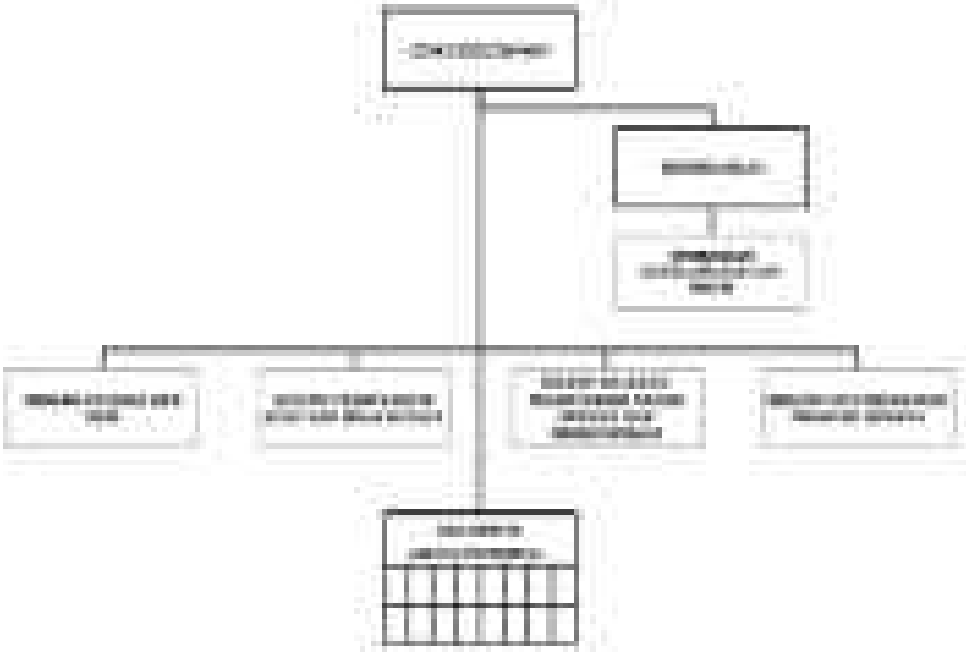

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Museum Bung Karno Blitar dan Taman Budaya

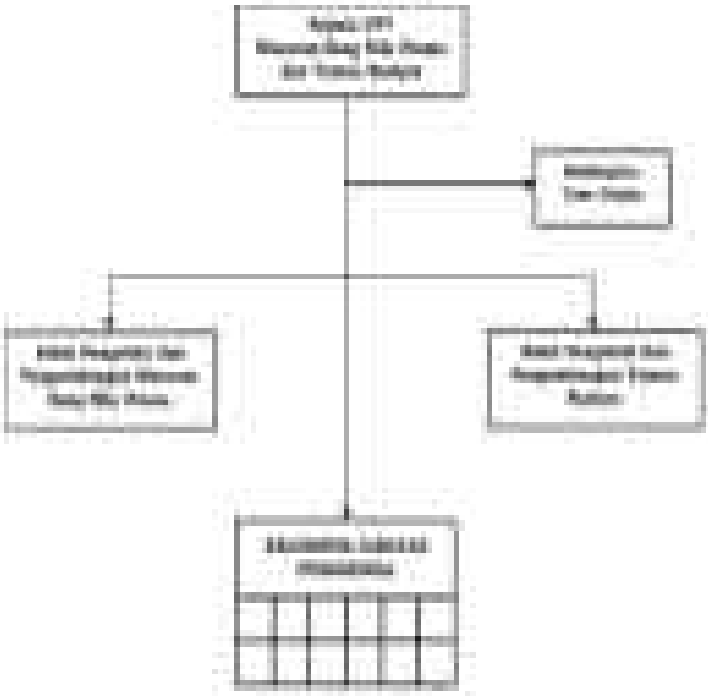

B. Sumber Daya Manusia Mitra Kebudayaan

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau di dalam data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan yang berjumlah 112 orang. Adapun rincian sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	68	44	112

Tabel 1.2 Rasio Pegawai menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	2	3	6
2	Perempuan	-	-	4	3	7
JUMLAH		-	1	6	6	13

Tabel 1.3 Rasio PNS menurut Golongan

No	Jenis Kelamin	Golongan PNS				Golongan PPPK			Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	Laki-laki	-	4	22	10	11	2	2	51
2	Perempuan	-	1	22	9	12	3	2	49
JUMLAH		-	5	44	19	23	5	4	100

Tabel 1.4 Rasio dan menurut Pendidikan Formal

No.	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	-	30	-	7	27	27	-	68
2	Perempuan	-	-	14	-	4	27	14	-	59
JUMLAH		1	-	34	-	7	44	78	-	127

Tabel 1.6 Klasifikasi Aset Komposisi Tertentu

No	Jenis Barang	Baik - Baik	Rusak ringan	Jumlah
1	Pemong Budaya AKI Mesjid Bayanan	2	–	2
2	Pemong Budaya AKI Mesjid Kampung Jawa	2	–	2
3	Pemong Budaya AKI mesjid Gunungsindur	2	–	2
4	Pemong Budaya AKI Masjid Pilar Budaya	–	2	2
5	Pemong Budaya AKI Masjid Legok Budaya	2	–	2
6	Pemong Budaya AKI Masjid	7	2	9
7	Pemong Budaya AKI Pertanian	7	1	7
8	Pemong Budaya Tanengkl	2	2	2
9	Arsip Kabupaten	2	–	2
10	Perpustakaan AKI Masjid	2	–	2
11	Perpustakaan AKI Pertanian	2	2	2
12	Artefak AKI Pertanian	–	2	2
13	Artefak Tanengkl	2	–	2
JUMLAH		34	11	23

Tabel 1.6 Kondisi Sarana Pendukung Tim PDT

No	Sarana Pendukung Tim PDT	Baik - Baik	Rusak ringan	Jumlah
1.	Cleaning Service	8	17	18
2.	Security	77	–	77
JUMLAH		87	17	97

1.2 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penyelenggaraan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Sastra, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Sastra, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Sastra, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya;
d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Sastra, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan
e. Permuseuman, dan Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis dalam urusan kebudayaan (pengelolaan pelestarian dijal pemajuan kebudayaan mengalami ke pentingi. Dikenal pada kebudayaan sebagai pada yaitu nilai-nilai budaya warga. Dimana dalamnya masyarakatan dalam masih sebagai bagian dari dari pemajuan budaya warga yang dalam dilestarikan secara optimal. Dan lainnya itu optimalkan pelestarian budaya warga agar menjadi pertimbangan kebijakan kedepannya pelestari kebudayaan warga mengapresiasi ruang lingkup pelindungan pengembangan pemanfaatan dan pembinaan yang mengacuan kilas pemajuan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan pemajuan Kebudayaan Daerah Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengidentasi upaya pada pelindungan dan pengembangan objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam rangkaian dalam wadah rumpun kesatuan budaya daerah, atau yang dilindungi dan kesatuan budaya daerah atau yang dikembangkan sebagai alasan dalam kaidah pelestarian program dan kegiatan kebudayaan.

1.2 Permasalahan utama

Permasalahan - permasalahan utama yang dihadapi adalah dalam optimalisasi pelestarian dan pengelolaan kebudayaan dari ini dirumuskan berupa:

1. **Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Belum Optimal**
   1) Banyak situs geoheritage dan bangunan warisan budaya belum terjaga dengan baik
   2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kampanye kebudayaan
   3) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya
   4) Kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan untuk generasi muda dan kaum pelajar
   5) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian (Identifikasi, Inventarisasi, Kajian, Penggalian dan Pendokumentasi, pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan

e) [illegible] dan bentuk [illegible] manusia dalam kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat

f) Nilai [illegible] sebagai pelestarian dan pengembangan [illegible] kebudayaan [illegible] yang dikembangkan oleh kearifanlokal dan [illegible] sumber daya manusia kebudayaan, serta dukungan sarana dan prasarana pelestarian budaya.

Masih [illegible] warisan budaya dan agama yang [illegible] dan dikaji oleh pihak lain. Hal ini merupakan pula [illegible] pemahaman dalam [illegible] dan melestarikan warisan budaya dan agama. Saat [illegible] dalam hal warisan budaya dan agama yang [illegible] pada manfaat pemanfaatan [illegible] dalam mengatasi [illegible] warisan budaya dan agama.

2. **Bidang dan Mendukung [illegible] budaya [illegible] sebagai [illegible].**

Dengan perkembangan [illegible] yang [illegible] dapat memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dalam [illegible] tanpa [illegible] agama [illegible] dengan [illegible] yang [illegible] terjadi [illegible] melestarikan [illegible] nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak [illegible] lagi [illegible] dan manfaat nilai yang [illegible] dan bangsa dan [illegible] [illegible].

3. **Promosi, Diplomasi dan dan Pemaknaan Budaya yang Bahan [illegible].**

Untuk [illegible] promosi, diplomasi dan pemaknaan budaya ada [illegible] yang [illegible]:

a. [illegible] pengetahuan masyarakat dalam [illegible] budaya yang [illegible] [illegible] tentang budaya masih [illegible] dalam hal ini diplomasi-diplomasi kebudayaan [illegible] untuk pengembangan kebudayaan kita di dalam negeri maupun di luar negeri

b. [illegible] pengetahuan masyarakat terhadap keberagaman budaya antar daerah sehingga [illegible] promosi [illegible] dipertahankan

c. Dalam upaya sebagai sampaikan untuk mengatasi hambatan pelaku budaya adapun dalam hambatan pelaku budaya yang mengakibatkan terkecoinya pelaku budaya dapat dia cara dalam masyarakat budaya yang berubah menyusunnya.

4. Peran Pelaku Budaya dalam mewujudkan Kebudayaan

Mengancangan sebuahnya kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, tentunya pelaku budaya dalam sebuanya masih dibiarkan secara mandiri, di sisi lain pemerintah juga dalam upaya dalam melibatkan peran pelaku budaya tersebut.

1.6 Profil Lampung Barat Laporan Kinerja Evaluasi Budaya tahun 2021

Adapun profil Lampung Barat berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2021 adalah adapun berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Sudah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi sasaran kinerja (IKU) secara berkala

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sudah dijadikan acuan dalam pemantau capaian dan pencapaian cara penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

c. Pelaporan Kinerja

1) Sudah menyajikan laporan kinerja yang memuat laporan kinerja yang memuat realisasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis (IKU)

2) Sudah menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja tahun tahun sebelumnya

3) Penyajian informasi SAKIP Laporan kinerja sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Perencana Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusun Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

[illegible]

d) [illegible] [illegible] [illegible]

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kebudayaan tahun 2020-2024 dan sasaran anggaran yang ada, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali telah menyusun perjanjian Kinerja tahun 2021. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Isinya sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut dipilih berdasarkan kewenangannya pada aspek periode.

2.1. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

A. Tujuan:

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan tahun 2020-2024 ditentukan untuk mengkualifikasi kebudayaan yang pada sebagaimana dikemukakan dalam rumusan misi dan visi dengan demikian, tujuan strategis Dinas Kebudayaan provinsi Bali 2020-2024 adalah meningkatkan penajaman kebudayaan Hindu dengan indikator pemantapan pengkajian budaya Hindu.

B. Sasaran Strategis

Untuk mencapaian tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Hindu

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Hindu Bali melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengemasan, pemeliharaan, penyebarluasan, publikasi, pengajian, pengembangan serta pembinaan terhadap pelaku dan lembaga budaya. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut:

a. Meningkatnya kualitas Hindu Bali yang berbudaya

3. Pemanfaatan budaya daerah yang dilestarikan.

4. Meningkatnya Ekspresi Budaya Daerah

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya, pengembangan seni budaya, serta pemanfaatan ruang ekspresi budaya sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan. Adapun indikator yang digunakan adalah **Nilai Ekspresi Budaya**.

5. Meningkatnya Nilai-nilai Budaya Daerah

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya daerah sebagai jati diri bangsa yang menjadi identitas budaya daerah. Indikator yang digunakan adalah **Nilai Warisan Budaya.**

6. Meningkatnya Energi Kreatif/Ide Penggerak Ekonomi

Sasaran ini dimaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam aktivitas energi kreatif masyarakat (seniman) sebagai sumber masyarakat dan lebih pemberdayaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Indikator yang digunakan adalah **nilai kreatif**

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No.	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Nasional (Kebudayaan Nasional)	Target Capaian Kinerja				
					2021	2022	2023	2024	2025
					Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
				[illegible]	-	-	-	-	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C. Strategi

Strategi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi yang lebih dikenalkan adalah pengunaan [illegible] strategi. Dari tujuan strategi tersebut, maka strategi menyediakan langkah-langkah pelaksanaan layanan kebudayaan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari setiap tujuan strategis. Rangkaian-langkah tersebut antara lain meliputi pemahaman, pilot-test, cobaan dalam masyarakat, pembangun harmoni sosial, edukasi, dan bantuan dalam kesadaranpublik; kebijakan-kaiman budaya lebih berpihak kepada (berpihak) warga citi kecil (tersingkir) kecilkan yang tinggal dengan melestarikan, memperhatikan dan memajukan nilai-nilai kebudayaan nusantara, tingginya apresiasi langkah ini dan keterkait kaya budaya yang membuang identitas mereka kebudayaan yang profesional lebih banyak dan kelembagaan proses dan dgkemasi budaya, dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan dipertimbangkan aspek usia, gender, sosial ekonomi, serta aspek kebudayaan yang dikedepankan pemerintah dan masyarakat.

D. Arah kebijakan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam kerangka ini : **Mewujudkan budaya daerah sebagai payung negeri dan mengembangkan perbedaan yang berdaya saing** *dengan mengunakan sebagai berikut*

Strategi umum sebagaimana dimaksudkan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode dua tahun yang akan datang, sambil ini akan dirumuskan beberapa arah kebijakan nasional 2.0 berdasarkan menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Dinas kebudayaan Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan dalam periode dua tahun kedepan (2020-2021) dan dalam rangka

[illegible] nilai-nilai dan [illegible] dan [illegible] pelestarian [illegible] [illegible] yang telah dicantum pada bagian sebelumnya.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perwujudan Daerah Jitua Kabupaten Pramuka Raya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota yang Berdiri Sama Tinggi, Sejajar, Bermartabat dan Tinggal di Indonesia (Kota Bermartabat)			
MISI 1 : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, produktif dan berpendidikan berkualitas yang			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan pemerataan Budaya Melayu	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Melayu	Meningkatkan penyebarluasan nilai pancasila kebudayaan	1. Meningkatkan kesadaran dan nilai pancasila kebudayaan 2. Meningkatkan pemahaman dan nilai pancasila kebudayaan 3. Meningkatkan penghayatan dan nilai pancasila kebudayaan 4. Meningkatkan pengamalan dan nilai pancasila kebudayaan
	Meningkatnya Dayasa Budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan dayasa budaya melayu	1. Meningkatkan kepedulian lembaga kepemuda budaya 2. Meningkatkan penyelenggaraan event kebudayaan
	Meningkatnya ekonomi masyarakat	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan ekonomi budaya melayu	1. Meningkatkan pelestarian pengembangan dan pemodernan ekonomi budaya
	Meningkatnya ekonomi Masyarakat Pemegang Adat	Pengadaan rumah bebas pekarangan	1. Pembangunan bedahan rumah dan rehabilitasi rumah

2.7 Perjanjian Kinerja

[illegible] dan penyusun [illegible] yang lebih tinggi lapisan penyusun [illegible] yang lebih rendah untuk melindungi penyusun/lapisan yang [illegible] dengan [illegible] sebelum penyusun [illegible] [illegible] dan [illegible] antara penyusun dan penyusun dan [illegible] yang [illegible] **[illegible] antara berbagai aspek fungsi dan [illegible] sumber daya** yang [illegible]. [illegible] yang [illegible] [illegible] pada [illegible] yang [illegible] [illegible] lapisan [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] (coconut) yang [illegible] [illegible] [illegible] lapisan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] dan lapisan [illegible] [illegible], sehingga [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible].

Tabel 2.2 Perjalanan [illegible] [illegible]

No.	Lapisan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	-
2	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	[illegible]	-
5	[illegible]	[illegible]	-
6	[illegible]	[illegible]	-

	Tahun	[illegible]	

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau yang memuat capaian strategis, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai selama tahun anggaran 2020, lakumi capaian dan indikator kinerja tersebut telah disesuaikan dengan dokumen Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2016-2026 dan mudah dapat dalam pengukuran serta evaluasi kinerja organisasi.

3.6 Rencana Anggaran Tahun 2016

Untuk mendukung keberhasilan capaian strategis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengalokasikan total pagu anggaran dari APBD sebesar Rp. 33.[illegible]/- pada APBD-P berupa penurunan anggaran hampir Rp.24.777.477.514, dikarenakan adanya realokasi anggaran. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melaksanakan 3 (Tiga) program, terdiri dari 3 (tiga) program non urusan dengan dukungan dana sebesar Rp. [illegible] dan 4 (Empat) program urusan wajib dan pilihan dasar, dengan dukungan dana sebesar Rp. [illegible]/- dimana anggaran tersebut termasuk [illegible] dan Dak non fisik, dengan anggaran Dak non fisik sebesar Rp. [illegible] dan APBD sebesar Rp. [illegible] yang dialokasikan dari kabag dan UPT di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai Perjanjian Kinerja yang telah dipersiapkan pada tahun 2014, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Oleh karenanya begitu dimungkinkan (Sebenarnya/seharusnya) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisa capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian implisit pencapaian kinerja dari sebelas sasaran strategis beserta indikator kinerja utamanya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2014 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2014, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau menetapkan sasaran strategis yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kebudayaan daerah yang merupakan kewajiban kebudayaan nasional. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan sasaran target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2014.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2014 terdiri dari:

1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya melayu;
2. Meningkatnya Apresiasi Budaya Melayu;
3. Meningkatnya Pelestari Budaya Melayu;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesenian daerah;

Tabel 2.1
Skala Nilai Perbedaan Rasio

No	[illegible]	[illegible]
1	92 s/100	Sangat Baik
2	76 s/92	Tinggi
3	68 s/75	Sedang
4	51 s/67	Rendah
5	s/50	Sangat Rendah

Dalam penelitian ini yang berarti proses nilai (skala interval) ini yang cara indikator dapat dihitung sebagai berikut :

- Nilai Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja organisasi telah memenuhi target dan bahkan dalam pencapaian maximal kelebihan pembiasa kinerja
- Nilai Sedang : pencapaian /realisasi kinerja organisasi telah memenuhi pencapaian minimal
- Nilai Rendah dan sangat Rendah : pencapaian /realisasi kinerja organisasi belum memenuhi/belum dibawah pencapaian minimal/ pencapaian kinerja yang dibengkalai

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pelindungan dan pengembangan objek kebudayaan indigo dan melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengkajian, pendidikan, penyebarluasan, publikasi, pengembangan dan pembinaan terhadap pelaku maupun lembaga budaya.

Adapun [illegible] dua indikator [illegible] pada Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan.

1. Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi

Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melaksanakan upaya pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi kebudayaan.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Tahun 2024, indikator Pemerintah Budaya Melayu Riau yang Dilindungi memiliki realisasi sebesar [illegible] dari target yang direncanakan sebesar [illegible], sehingga capaian kinerja mencapai [illegible] dengan kategori [illegible].

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi Objek Pemajuan Kebudayaan, fasilitasi pelestarian Warisan Budaya Takbenda, penyelamatan nilai budaya Melayu, serta penguatan kanal dan kebudayaan yang dikelola secara berkelanjutan.

Faktor pendukung keberhasilan antara lain adanya dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelestarian budaya Melayu, meningkatnya partisipasi

masyarakat dan pelaku budaya, serta senantiasa koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia kebudayaan yang memiliki kompetensi khusus, kurang efisiennya pelestarian objek budaya, serta keterbatasan anggaran untuk mengadakan sarana/objek pemajuan kebudayaan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi kebudayaan, serta mengusulkan kata-kunci komunitas budaya dalam pelestarian budaya Melayu.

3. Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan

Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan merupakan indikator yang menggambarkan capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam melaksanakan upaya pengembangan budaya melalui pengkajian revitalisasi, pengadaptasian, pembinaan pelaku budaya, pembinaan lembaga budaya, serta pengelenggaraan kegiatan kebudayaan.

Tabel 3.3
Capaian kinerja Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan
Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan	12,00	12,00	100,00

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan mencapai realisasi sebesar 12,00%

dan angat sekuat [illegible], sehingga mereka sepakat dimana mereka [illegible] dengan [illegible]

Realisasi dalam mencapai target secara penuh, berbagai kegiatan pengembangan budaya tetap dapat dilaksanakan melalui pemberian lembaga budaya, [illegible] pelaku budaya, pelestarian [illegible] budaya, promosi budaya Nusa, serta pengembangan ruang ekspresi budaya di Provinsi Riau.

Faktor pendukung pencapaian indikator ini secara luas tingginya partisipasi komunitas budaya, dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kebudayaan, serta meningkatnya kolaborasi dengan berbagai lembaga kebudayaan.

Sementara itu, faktor yang mengganggu dalam ketercapaian target secara optimal antara lain adanya keterbatasan [illegible] anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan, serta dalam [illegible] pelaksanaan program pengembangan budaya di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan meningkatkan koordinasi dengan komunitas budaya, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi budaya, serta mengoptimalkan [illegible] dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pengembangan budaya Nusa Riau.

2. Jumlah Meningkatnya Ekspresi Budaya Nusa

Jumlah ekspresi meningkatnya Ekspresi Budaya Nusa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya, memperkuat [illegible] dan [illegible], serta memperluas ruang ekspresi budaya sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan Nusa Riau.

Keberhasilan capaian ini diukur melalui indikator Nilai Ekspresi Budaya yang merupakan salah satu dimensi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

nilai Kapital sosial menggambarkan tingkat pencapaian masyarakat dalam lapangan budaya, pengembangan seni budaya serta pemanfaatan ruang dapoer budaya dalam kehidupan masyarakat.

Capaian Analisis pada Sasaran Meningkatnya Dapoer Budaya Nusantara Tahun 2020 dengan indikator Nilai Dapoer Budaya. Indikator Nilai Dapoer Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$I(X_i) = \frac{1}{4}\sum_{j=1}^{4} X_{i,j} = \frac{X_{i,1} + X_{i,2} + X_{i,3} + X_{i,4}}{4}$$

$$X_{i,j} = \frac{X_{i,j} - \min(X_{i,j})}{\max(X_{i,j}) - \min(X_{i,j})}, j = 1,2,3,4$$

Capaian Analisis pada Sasaran Meningkatnya Dapoer Budaya Nusantara dengan indikator Nilai Dapoer Budaya sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Nilai Dapoer Budaya

Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Dapoer Budaya Nusantara	Nilai Dapoer Budaya	47,00	-	-	48,00	51,75	94,00

Sumber Data: Kementerian Kebudayaan dan Riset, Teknologi

Mengacu dengan pencapaian LKPP Tahun 2021, realisasi indikator nilai Dapoer Budaya dalam dapat dimaknai bahwa hasil pengitungan nilai indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 masih dalam proses penyelesaian oleh Kementerian Kebudayaan dan Bappenas berdasarkan mekanisme penghitungan nasional. Hasil capaian tahun berjalan akan dipublikasikan pada tahun berikutnya setelah adanya data nasional resmi diterbitkan oleh Badan.

Meskipun capaian indikator belum tersedia, Unit Kebudayaan Pusat dan UPT melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

pengelolaan digitasi budaya masyarakat, antara lain penyelenggaraan festival budaya, pembuatan konten seni budaya, literasi publik budaya, penyelenggaraan ruang digitasi budaya, pemetaan kondisi budaya riil, serta pelestarian berbagai ekspresi seni pertunjukan dan kebudayaan.

Pertumbuhan dengan capaian nilai sementara menunjukkan bahwa pada tahun 2024 indikator Nilai Digitasi Budaya memiliki angka sebesar 60,20 dengan realisasi sebesar 36,74 atau mencapai 74,68%, angka tersebut menjadi dasar bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk terus memperkuat kualitas program dan kegiatan yang mendukung pengisian digitasi budaya masyarakat.

Faktor pendukung pelaksanaan program yang berkontribusi terhadap pencapaian Nilai Digitasi Budaya antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian seni budaya, serta semakin digifyc komunitas seni dan budaya dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya Bali.

Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya efisiensi anggaran pada kegiatan kebudayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung digitasi budaya, serta belum maksimalnya alias masyarakat terhadap kegiatan kebudayaan di ranah digital Provinsi Bali.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali akan terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas budaya, memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi budaya, meningkatkan pemetaan potensi budaya, serta menyesuaikan strategi dengan pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.

Grafik 3.7 Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Digitasi Budaya Dengan Capaian Nasional

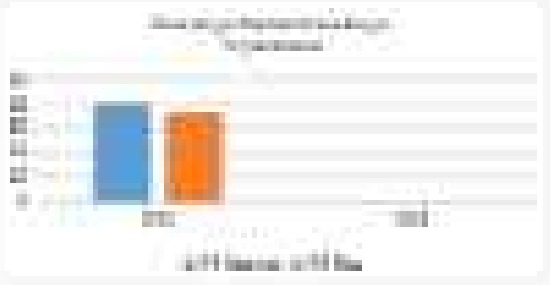

Berdasar diagram diatas diketahui tahun 2021 indikator Nilai Budaya sebesar 88,96 lebih rendah dari Indikator Tingkat Kesenian sebesar 89,85.

Pengaruh efisiensi dibelanja dengan menggunakan perbandingan antara yang dibelanja antara sumber daya yang digunakan. Indeks efisiensi menggunakan sumber daya (masukan dan output) untuk menyajikan ukuran efisiensi pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Budaya Budaya

Sasaran	Indikator/Capaian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ragam Budaya Budaya	Nilai Ragam Budaya	[illegible]	[illegible]	79,66%

Pagu anggaran OPD untuk sasaran Meningkatnya Ragam Budaya Budaya dengan indikator nilai Ragam Budaya sebesar Rp. [illegible] dengan realisasi anggaran Rp. [illegible] dan capaian sebesar 79,66%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3. Program Pengelolaan Permuseumanan

3. Sasaran Meningkatnya Minat Budaya Budaya

Sasaran meningkatnya Minat Budaya Budaya tentunya

untuk meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya [illegible] yang berasal dari masyarakat [illegible] [illegible] ini dimaksudkan untuk mengali kearifan-kearifan budaya [illegible] sebagai [illegible] dari masyarakat [illegible] sebagai [illegible] pembangunan daerah.

Indikator capaian ini dalam [illegible] indikator **Nilai Nilai Budaya** yang merupakan salah satu dimensi dalam [illegible] pembangunan kebudayaan (IPK). Nilai Nilai Budaya menggambarkan implikasi pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya Tahun 2015 diukur indikator Nilai Nilai Budaya. Indikator Nilai Nilai Budaya dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_i = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} I_{ij} = \frac{I_{i1}+I_{i2}+I_{i3}+I_{i4}+I_{i5}+I_{i6}}{6}$$

$$I_{ij} = \frac{X_{ij} - \min(X_{ij})}{\max(X_{ij}) - \min(X_{ij})} \quad j = 1,2,3,4,5,6$$

capaian kinerja pada sasaran meningkatnya nilai-nilai budaya dengan indikator nilai nilai budaya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Capaian indikator nilai nilai budaya

Sasaran	Indikator	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya (IKK)	Nilai Nilai Budaya	77,00	-	-	78,00	71,16	91,23

Sumber Data : Dinas Kebudayaan - Bernadi Kurniadi, S.Sos, MM

Sampai dengan penyusunan LKjIP tahun 2014, realisasi indikator nilai nilai budaya belum dapat dilaporkan karena hasil penghitungan nilai

[illegible] kebudayaan tidak [illegible] masih dalam proses penilaian dan pengolahan oleh kemampuan kebudayaan dan anggaran oleh karena itu, [illegible] banyak indikator ini belum dapat diukur pada saat penyusunan laporan.

Sebagian [illegible] indikator belum terisi. Dinas Kebudayaan Pariwisata Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian nilai warisan budaya antara lain [illegible] Objek Pemajuan Kebudayaan, fasilitasi penetapan Warisan Budaya Takbenda, pelestarian cagar budaya, pengadaan [illegible], pendokumentasian budaya, serta pembinaan terhadap pelaku dan lembaga budaya.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2024, indikator Nilai Warisan Budaya memiliki target sebesar 56,48 dengan realisasi sebesar 52,84 sehingga capaian kinerja mencapai 93,54%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan warisan budaya telah berjalan dengan baik dan menjadi dasar dalam pelaksanaan program Tahun 2025.

Faktor pendukung pelaksanaan program secara [illegible] adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya daerah, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya serta tersedianya [illegible] untuk dengan pemanfaatan kebudayaan/[illegible] dan berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.

Adapun tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pelestarian warisan budaya, [illegible] objek budaya yang harus dilindungi dan dikelola, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan pelestarian warisan budaya.

Sebagai upaya perbaikan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan terus memperkuat inventarisasi dan dokumentasi objek budaya, meningkatkan

bertolak dengan pemerintah kabupaten/kota, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data budaya, serta memperkuat gotongroyong masyarakat dalam pelestarian warisan budaya mereka.

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021 dengan Indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional tahun dapat dilihat berikut realisasi tahun 2021 lebih atas. Sedangkan Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2021 dengan Indikator Nilai Warisan Budaya dengan Tingkat Nasional dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Warisan Budaya Dengan Tingkat Nasional

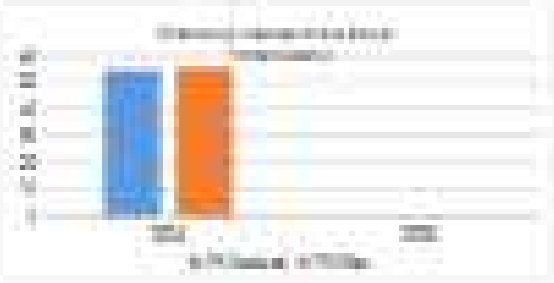

Realisasi kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2021 indikator nilai warisan budaya sebesar 76,44 lebih tinggi dari realisasi tingkat nasional sebesar 54,33.

Anggaran efisiensi dicapaikan dengan menggunakan perbandingan masukan yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Analisa efisiensi menggunakan sumber daya (masukan dan aktivitas) terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Nilai Warisan Budaya

Masukan	Indikator Kinerja	Keterangan

		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemberian Budaya Melayu	Nilai Pemberian Budaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Apa anggaran [illegible] untuk [illegible] pemberian [illegible] budaya melayu dengan indikator nilai [illegible] budaya sebesar Rp. [illegible] dengan realisasi keuangan Rp. [illegible] dan capaian sebesar [illegible]%.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya.

Dapat [illegible] anggaran yang [illegible] [illegible] dana yang [illegible] [illegible] [illegible]

capaian Sasaran jadi dasar mengukur kinerja dicantumkan strategis sasaran dengan indikator nilai tolok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 capaian indikator nilai tolok

Sasaran	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai tolok	66,00	-	-	66,00	66,00	-

Target Nilai Tolok untuk tahun 2017 telah telah dilaksanakan pada tahun berakhir indikator nilai tolok belum dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kabupaten Provinsi Riau tahun 2018 target nilai tolok 61,41% dan hasil realisasinya 65,07, sedang tahun tahun 2019 target nilai tolok 63,31% dan hasil realisasinya belum ada.

Berikut hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kabupaten Provinsi Riau tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Table 3.7 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan nilai

No	Unsur	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00	30	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,00	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,50	25	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi		67,70		68,00
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2017 belum baik, sebagaimana telah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kabupaten Provinsi Riau Tahun 2018 memperoleh hasil

sangat penting untuk [illegible] dan [illegible] [illegible] sehingga nilai [illegible] [illegible] menjadi [illegible] dengan predikat [illegible] ini berarti manajemen kinerja implementasi dikategorikan [illegible] "baik". Penyelenggara berhasil melaksanakan [illegible] yakni pelaksana dalam implementasi manajemen kinerja, [illegible] pada aspek perencanaan, pelaporan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Adapun pendukung penyelenggara kualitas LKjIP antara lain kendala [illegible] tersedia pencapaian manajemen kinerja; meningkatnya kendala [illegible] dalam pengumpulan dokumen pemantauan dan pelaporan, serta pelaksanaan monitoring dan analisis kinerja secara berkala.

Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan; masih perlunya pengantar [illegible] kinerja hingga level individu; serta perlunya penyelenggara kualitas [illegible] dalam dokumen LKjIP.

Sebagai [illegible] [illegible] [illegible]

sesuai pengalokasian anggaran sebesar xxxx juta x (lima) program [illegible] kabupaten [illegible] [illegible] dan dua [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Grafik 3.8

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Dinas Kebudayaan Tahun 2023

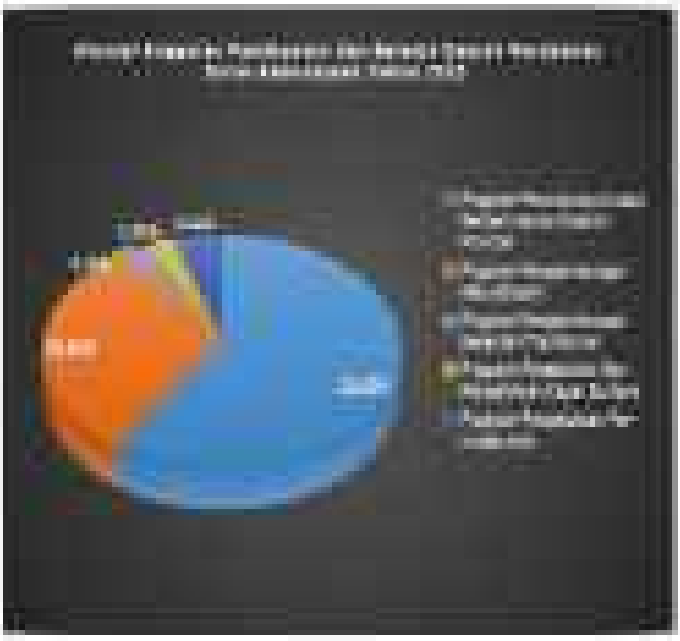

Tabel 3.19

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Dinas Kebudayaan Tahun 2023

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	[illegible]	[illegible]
3.	Program Pengembangan Cagar Budaya	[illegible]	[illegible]
4.	Program Pendidikan Dan Pengajaran	[illegible]	[illegible]

	Cegah Polusi		
2	Program Pengelolaan Persampahan	[illegible]	[illegible]
TOTAL BELANJA		[illegible]	100%

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Kampung Sawiran 2022

Anggaran kebudayaan tahun 2022 sebesar Rp. [illegible] yang terdapat pada 1 (satu) program di bidang dan [illegible] anggaran tersebut dalam total 8 (dua) digunakan untuk membayar 1 (satu) program tari anak dan 1 (satu) program arisan sapi tari pelestari dalam pembangunan kebudayaan.

Dari pagu anggaran kebudayaan tahun kebudayaan sebesar Rp. [illegible] dibagi tari dan [illegible] dengan anggaran Rp.[illegible] tersisa [illegible] Rp. dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp.[illegible] sebagaimana untuk realisasi keseluruhan dalam pelaksanaan program dinas kebudayaan kampung tersisa Rp.[illegible]. Dari total anggaran Rp.[illegible] atau sebesar [illegible] %, sebagian penyerapan dana untuk anggaran kebudayaan [illegible] dana tersisa [illegible] atau sebesar [illegible]. Dengan realisasi fisik sebesar [illegible], dengan demikian capaian kinerja realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[illegible] Warga Pelaku [illegible]	[illegible] Warga Pelaku	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] Sarana [illegible]	[illegible] Sarana Pelaku	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun beberapa indikator sasaran

masih menunggu hasil penyaluran manual dari kementerian kebudayaan dan keuangan, sehingga program pendukung yang dilaksanakan secara optimal guna mendukung pencapaian target pembangunan kebudayaan daerah.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap upaya pelestarian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau, antara lain Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Program Pengelolaan Permuseuman. Mengingat indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan merupakan indikator baru yang mulai diukur pada LKIP Tahun 2025, maka realisasi capaian anggaran dilakukan berdasarkan program-program pendukung yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

Realisasi pada Tahun 2025 menunjukkan anggaran yang telah dimanfaatkan pada pelaksanaan beberapa kegiatan, Biro Kebudayaan Provinsi Riau telah mampu mempertahankan capaian indikator Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi sebesar 100,00% dan Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan sebesar 99,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif untuk menjaga keberlanjutan program kegiatan, optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pelibatan komunitas budaya serta penguatan kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan kebudayaan.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga terlihat dari keseimbangan anggaran dalam mempertahankan capaian. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kolaborasi kegiatan yang terintegrasi pada hasil (outcome) memungkinkan keberlanjutan program

pelindungan dan pengendalian dampak yang berdasar secara langsat yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat dimpulkan bahwa penggunaan sumber dana pada Dinas Lingkungan Pelindungan dan Pengendalian Dampak Kerja telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan pencapaian indikator Persentase Dampak Kerja yang dilindungi dan Pelaku Dampak Kerja yang ditindaklanjuti telah lebih dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, namun juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta kesadaran komunitas dan lembaga kemasyarakatan. Dari seluruh itu, capaian kinerja yang dipandang mengalami nilai efisiensi artinya penggunaan sumber dana kecangan, sumber dana manusia, serta dukungan jaring pengaman lingkungan dalam pelaksanaan urusan kebudayaan.

Realisasi nilai dana sisa anggaran sebesar 6 (Enam) program yang dilaksanakan oleh Bidang dan UPT Dinkgunjaga masih dikalkulasi secara akurat tahun 2022.

Tabel 5.13
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kebudayaan Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Program Pengembangan Kebudayaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Program Pengembangan nilai-nilai tradisional	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Program Pelestarian dan Pengembangan bahasa daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5	Program Pengelolaan Kebudayaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total Anggaran	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

Realisasi anggaran untuk kebudayaan provinsi mencapai sekitar [illegible] dari total pagu anggaran sebesar [illegible].

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat beberapa kegiatan mengalami penyesuaian pada akhir tahun berjalan.

Program Penyajian Ulang Pemanfaatan Bangunan Bersejarah memiliki realisasi tertinggi sebesar [illegible] yang menunjukkan dukungan administrasi pemanfaatan bangunan berjalan dengan baik.

Program Pengembangan Kebudayaan memiliki sebesar [illegible] dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, pembinaan pelaku budaya serta pendanaan kegiatan kebudayaan.

Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya memiliki realisasi sebesar [illegible] yang berkontribusi langsung terhadap pelestarian warisan budaya Pelaga melalui inventarisasi, penilaian dan pengelolaan objek cagar budaya.

Program Pengelolaan Permuseuman terealisasi sebesar [illegible] dan mendukung upaya pelestarian serta pemanfaatan koleksi museum sebagai media edukasi dan pelestarian budaya.

Sedangkan Program Pengembangan Kawasan Strategis memiliki realisasi sebesar [illegible] yang dipengaruhi oleh adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat efisiensi anggaran pada akhir tahun.

Dengan capaian realisasi anggaran sebesar [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

4) *Menyusun dan program dan lapotan bulanan, triwulanan dan tahunan*

5) *Tentar dan mmuat Dan Akuntansi telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai tugas dan fungsi telah hal tersebut dengan dikomen dokumen pemerintah OPD.*

Untuk mencermatan bahas dan temuan capaian inovasi wawancara dan orang APIP sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal diusah ia dinas yang untuk dibahas:

1) *Adakah rencana program dan lapotan yang lebih realistis, dengatuan dan tantangan antara program yang satu dengan program lainnya.*

2) *Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat Dan Akuntansi Provinsi Aceh terkait dengan pemahaman pengunggahan dan laporan.*

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2021 menyajikan pencapaian pelaksanaan Agenda Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Sebagai bagian dari pelaksanaan Anggaran, hasil-hasil kegiatan tentunya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pemangku kepentingan (stakeholder) Pada Kebudayaan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2021 menyampaikan informasi capaian kinerja secara strategis dari suatu program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Tahun 2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang merupakan pencapaian sasaran strategis pembangunan kebudayaan daerah.

Pada sasaran **Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu**, indikator Partisipasi Budaya Melayu yang Berhasil terbentuk mencapai target sebesar 81,00% dengan realisasi sebesar 81,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% (Sangat Baik). Sedangkan indikator Partisipasi Budaya Melayu yang Berkembangkan mencapai realisasi sebesar 12,00% dari target sebesar 14,00% atau mencapai 85,71% (Tinggi).

Pada indikator Nilai Ekspresi Budaya dan Nilai Warisan Budaya tahun 2021 dalam nilai akhir berasal hasil penghitungan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 masih dalam proses pengolahan dan verifikasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Dapatnya Riset Nasional (Ki hasil capaian nilai indikator tersebut akan disampaikan pada Kementerian pusat.

[illegible] sebesar [illegible] mengalami [illegible], hasil evaluasi nilai [illegible] tahun [illegible] yang [illegible] mengalami [illegible], hasil evaluasi [illegible] dari [illegible] evaluasi kinerjanya [illegible]

Tabel 4.1
Hasil evaluasi capaian dari [illegible] tahun [illegible]

Urusan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah IKU	%
1	2	3	4	5
I	110% s/d 120%	Sangat Tinggi	2	100 [illegible]
II	90% s/d 90%	Tinggi	–	–
III	80% s/d 75%	Sedang	1	24,77
IV	65% s/d 60%	Rendah	–	–
V	< 50%	Sangat Rendah	–	–

Dari capaian pengukuran kinerja [illegible] Provinsi Riau tersebut menunjukkan anggaran sebesar Rp[illegible] atau [illegible]% dari total pagu anggaran sebesar Rp[illegible]. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat penyesuaian anggaran pada tahun berjalan.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 telah memberikan kontribusi terhadap pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian budaya daerah. Hasil ini menunjang pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan daerah.

4.2 LANGKAH STRATEGIS

Adalah [illegible] atau kegiatan yang [illegible] pada tahun 2024 pelaksanaan [illegible] Provinsi Riau tahun [illegible] mengalami dinamika dampak bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan untuk tercapai strategi yang telah dirancang.

Dinas Kebudayaan pada masa kepemimpinan dilaksanakan langkah-langkah strategis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan kesenian berdasarkan bukti yang lebih baik. Di masa depan, sejumlah langkah-langkah strategis yang akan dicetak adalah berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau;
2. Meningkatkan Nilai Budaya Melayu Riau;
3. Meningkatkan Kelestarian Warisan Budaya Melayu Riau;
4. Meningkatkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu;
5. Meningkatkan Kualitas dalam kemitraan budaya, diplomasi, dan pemartabatan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi akuntabilitas Dinas Kebudayaan di masa mendatang dan datang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU

Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab jabatan/tugas yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAKRIONA PARNAMUT, S.Sos.,MM

Jabatan : PLt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RAHMAN HADI, M.Si

Jabatan : PJ. GUBERNUR RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam rangka realisasi target kinerja jika terdapat sisa/lebih akan dikoordinasikan dulu kepada pimpinan.
Akuntabilitas dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pencapaian perjanjian ini dan lainnya.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
PJ. GUBERNUR RIAU	PLt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
Dr. RAHMAN HADI, M.Si	JAKRIONA PARNAMUT, S.Sos., MM Pembina Tk.I NIP. 197007261994021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	[illegible]	[illegible]	-
2	[illegible]	[illegible]	-
3	[illegible]	[illegible]	-
4	[illegible]	[illegible]	-
5	[illegible]	[illegible]	-
6	[illegible]	[illegible]	-
	Total	[illegible]	-

[illegible], [illegible] 2025

[illegible] RIAU

[illegible]

[illegible] DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. R.E. Martadinata No. 175 Depok, Tanjungpura Selatan, Bantar
Telepon (021) 1945 0000
Laman kemdikbud.go.id
Pos-el surat@kemdikbud.go.id

Nomor : 4/K/KS.10/2024 Januari 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pendaftaran Data Pendanaan Kebudayaan (DPK) Tahun 2024

Yth. Bapak/Ibu
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kebudayaan (daftar nama terlampir)
Di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mendukung salah satu rapatan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan rapatan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tahun 2021-2045 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tahun 2021-2045, bersama hal tersebut sesuaikan Salinan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 315/M/2023 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, untuk dilaksana dan dipersiapkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud,

Prof. Dr. Dimyati, S.E., M.A.
NIP 196812221000031200

Lampiran surat undangan
Nomor : [illegible]
Tanggal : 7 Januari 2011

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan, Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi D.I. Yogyakarta
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
17. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
30. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
35. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua
36. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan
37. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan
38. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah

[illegible]

SALINAN

[illegible]

KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [illegible]
TENTANG
PENGELOLA PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kelola Pengembangan Kebudayaan merupakan [illegible] dari [illegible] Pengelola Kelola Pengembangan Kebudayaan Tahun 2023-2045 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor [illegible] Tahun 2024 tentang Rencana Kelola Pengembangan Kebudayaan Tahun 2025-2045;

b. bahwa sebagai dari [illegible] [illegible] Pengembangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] pengembangan kebudayaan [illegible] [illegible] [illegible];

c. bahwa [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] Peraturan Presiden Nomor [illegible] Tahun 2024 tentang [illegible] [illegible] [illegible] pengembangan Kelola Pengembangan Kebudayaan Tahun 2024 [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu [illegible] Keputusan Menteri Kebudayaan tentang Pengelola Pengembangan Kebudayaan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2008 tentang [illegible] Negara [illegible] Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2024 tentang [illegible] atas Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2008 tentang [illegible] Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible];

2. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible];

3. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2024 tentang [illegible] Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible];

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717);
5. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Rencana Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 218);
6. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1128);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1241);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 pengukuran/pencapaian Indeks IPK Tahun 2024.

KEDUA : IPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a. IPK Nasional Tahun 2024; dan
b. IPK Provinsi Tahun 2024.

KETIGA : IPK Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
a. nilai IPK Nasional keseluruhan domain; dan
b. nilai indikator penyusun IPK Nasional.

KEEMPAT : IPK Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
a. nilai IPK Provinsi keseluruhan domain; dan
b. nilai indikator penyusun IPK Provinsi.

KELIMA : IPK Nasional Tahun 2024 dan IPK Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tertuang dengan Diktum KESATU/KE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

MENIMBANG : [illegible]

MENGINGAT : [illegible]

MENETAPKAN : [illegible]

Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FADLI ZON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum, Organisasi
dan Tata Kelola Kerja Sama,

[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/M/2025
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional

1. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Nasional Menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	31.20
D2	Pendidikan	72.41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	70.71
D4	Warisan Budaya	54.30
D5	Ekspresi Budaya	39.85
D6	Budaya Literasi	64.40
D7	Gender	87.21
IPK Nasional		59.08

2. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Nasional

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
K1.1	Persentase individu yang pernah melihat sebagai produk/pelayanan budaya yang mengalami transformasi, baik sebagai sumber penghasilan	0.31
K1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4.10
D2	Dimensi Pendidikan	
K2.1	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran kesenian dan budaya daerah dan/atau tradisional lainnya	63.93
K2.2	Persentase guru yang mengajar kesenian dan budaya lokal berbasis kearifan lokal	39.52
K2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan/atau pemanfaatan seni dan budaya yang bernilai sentimental dan informal	76.41
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
K3.1	Persentase rumah tangga yang mengalami dan/atau mengakui nilai dari nilai lain yang melekat dan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	80.19

Kode	Nama Indikator	Nilai
[illegible]	Persentase penduduk yang mengikuti [illegible] di lingkungan sekitar	[illegible]
[illegible]	Persentase rumah tangga yang [illegible] di lingkungan sekitar rumah	[illegible]
D4	Dimensi Kesatuan Budaya	
[illegible]	Persentase [illegible] yang [illegible] dan [illegible] yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible] yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible]	[illegible]
D5	Dimensi Bhinneka Budaya	
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D6	Dimensi Budaya Literasi	
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D7	Dimensi Gender	
[illegible]	Rasio [illegible]	[illegible]
[illegible]	Rasio [illegible]	[illegible]
[illegible]	Rasio [illegible]	[illegible]

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi

1. Provinsi Aceh

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	15,00
D2	Pendidikan	76,06
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73,97
D4	Warisan Budaya	40,22
D5	Empresi Budaya	86,89
D6	Budaya Literasi	47,41
D7	Gender	83,76
IPK Provinsi		57,17

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengandung nilai/kearifan lokal. 1.1 sebagai sumber pengetahuan	0,20
D1.2	Persentase penduduk yang pernah melihat/mengunjungi museum, rumah adat, bangunan, benda dan jasa kebudayaan berhadap nilai pengetahuan kesenian	0,02
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal, bahasa, daerah, kesenian, budaya lokal	84,79
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	31,66
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dalam angkatan pelestari dan pendidikan seni dan budaya yang mendukung kesenian dan kebudayaan	93,79
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang ada di dalam satu lingkungan yang dan nilai yang mendukung kegiatan di lingkungan pelestari tempat tinggal	91,37
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	89,11

Kode	Nama Indikator	Nilai
X5.3	Persentase rumah tangga yang menerima akses [illegible]	81.45
D4	Dimensi Nilaian Budaya	
D4.1	Persentase [illegible]	4.38
D4.2	Persentase [illegible]	17.70
D4.3	Persentase [illegible]	75.08
D4.4	Persentase [illegible]	70.15
D4.5	Persentase [illegible]	10.55
D4.6	Persentase [illegible]	40.45
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
D5.1	Persentase [illegible]	1.70
D5.2	Persentase [illegible]	10.60
D5.3	Persentase [illegible]	7.31
D5.4	Persentase [illegible]	80.71
D6	Dimensi Budaya Umum	
D6.1	Persentase [illegible]	80.71
D6.2	Persentase [illegible]	66.33
D6.3	Persentase [illegible]	12.92
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible]	41.02
D7.2	Rasio [illegible]	80.02
D7.3	Rasio [illegible]	0.86

2. Perubah Bandanya Utama
   a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi Bengkulu Tahunan

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	17,93
D2	Pendidikan	71,85
D3	Kebudayaan Sosial Budaya	77,46
D4	Warisan Budaya	45,36
D5	Ekspresi Budaya	32,40
D6	Budaya Literasi	63,37
D7	Gender	61,27
IPK Provinsi		49,11

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penikmat/pengunjung/pengelola atau yang mengetahui keberlangsungan di sekitar tempat tinggal	0,36
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan budaya dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	3,73
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang memanfaatkan guru yang menggunakan materi lokal/budaya daerah dan/atau metode pembelajaran	84,75
D2.2	Persentase guru yang mengajar budaya dan kearifan lokal/mengajar lokal guru	58,90
D2.3	Persentase penduduk yang berhak dengan materi pendidikan kearifan/budaya/sejarah dan budaya yang berdasar pada lokal/daerah	72,10
D3	Domain Kebudayaan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang sering/jarang ada anggotanya yang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	88,02
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	65,94
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible] pada [illegible] di lingkungan sekitar rumah	66,25

Kode	Nama Indikator	Nilai
D9	Dimensi Warisan Budaya	
D9.1	Persentase benda, bangunan, situs/kawasan, atau lanskap cagar budaya yang telah dilestarikan terhadap total pendaftaran	3.69
D9.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah dilestarikan terhadap total pencatatan	8.88
D9.3	Persentase pendudukan yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	44.44
D9.4	Persentase pendudukan yang menonton acara tayangan pertunjukan seni	37.46
D9.5	Persentase pendudukan yang mengapresiasi pertunjukan seni/ tradisional	14.16
D9.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	72.22
D10	Dimensi Ekspresi Budaya	
D10.1	Persentase pendudukan yang pernah terlibat sebagai pelaku pertunjukan pertunjukan seni	2.46
D10.2	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau mengadakan upacara adat dalam setahun terakhir	8.75
D10.3	Persentase pendudukan yang melakukan dialogan tradisional dan/atau permainan rakyat	8.45
D10.4	Persentase pendudukan yang [illegible] dan [illegible] [illegible] budaya [illegible] budaya di [illegible]	72.00
D11	Dimensi Budaya Lokal	
D11.1	Persentase pendudukan yang [illegible] [illegible] [illegible]	86.76
D11.2	Persentase pendudukan yang [illegible]	76.47
D11.3	Persentase pendudukan yang [illegible]	8.21
D17	Dimensi Gender	
D17.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	69.48
D17.2	Rasio pendudukan perempuan terhadap laki-laki yang memiliki jenjang [illegible]	93.14
D17.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	23.00

3. Provinsi Sumatera Barat
   a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	26.37
D2	Pendidikan	69.80
D3	Ketahanan Sosial Budaya	73.71
D4	Warisan Budaya	69.82
D5	Dimensi Budaya	28.32
D6	Budaya Digital	77.63
D7	Inovasi	80.46
IPK Provinsi		63.44

   b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Proporsi penduduk yang pernah [illegible] sebagai peserta/penonton pertunjukan seni yang menjadikan kebudayaan [illegible] sebagai sumber penghasilan	0.26
D1.2	Proporsi penduduk [illegible] dimensi budaya [illegible]	0.27
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Proporsi [illegible] pendidikan yang [illegible] guru yang [illegible]	69.32
D2.2	Proporsi guru yang [illegible] budaya [illegible]	81.63
D2.3	Proporsi [illegible] yang [illegible] budaya [illegible]	74.00
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
D3.1	Proporsi [illegible] yang [illegible]	76.46
D3.2	Proporsi [illegible] yang [illegible]	83.95
D3.3	Proporsi [illegible]	89.03

Kode	Nama indikator	Nilai
IV	Dimensi Nilai Budaya	
IV.1	Persentase [illegible] budaya [illegible]	[illegible]
IV.2	Persentase [illegible] budaya [illegible]	[illegible]
IV.3	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
IV.4	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
IV.5	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
IV.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	[illegible]
III.	Dimensi Ekonomi Budaya	
III.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/penikmat [illegible]	[illegible]
III.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	[illegible]
III.3	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
III.4	Persentase penduduk yang [illegible] budaya [illegible]	[illegible]
III.	Dimensi Budaya Material	
III.1	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
III.2	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
III.3	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
IV	Dimensi Sosial	
IV.1	Jenis [illegible]	[illegible]
IV.2	Jenis [illegible]	[illegible]
IV.3	Jenis [illegible]	[illegible]

4. Provinsi Riau

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Domain Budaya	Nilai
D1	Warisan Budaya	53,93
D2	Pendidikan	71,07
D3	Kesadaran Sosial Budaya	73,94
D4	Warisan Budaya	55,64
D5	Ekspresi Budaya	56,78
D6	Budaya Literasi	68,68
D7	Ekonomi	53,94
	IPK Provinsi	58,68

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Warisan Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat secara langsung produk-produk budaya [illegible] yang mencerminkan identitas budaya dan [illegible] pengetahuan	0,18
D1.2	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible] tempat dan [illegible] terhadap hasil pengetahuan [illegible]	3,79
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible] pendidikan yang [illegible] guru yang [illegible] [illegible] dan [illegible]	79,82
D2.2	Persentase [illegible] [illegible] dan budaya [illegible] guru	55,18
D2.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] pendidikan [illegible] [illegible] budaya yang [illegible]	71,07
D3	Domain Kesadaran Sosial Budaya	
D3.1	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] di lingkungan sekolah [illegible]	81,91
D3.2	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] di lingkungan sekolah	85,91
D3.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] di lingkungan sekolah [illegible]	55,85

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Wahana Budaya	
D4.1	Pemenuhan tempat, bangunan, ruangan, atau dan lapangan sesuai budaya yang telah dimiliki terhadap [illegible] pendidikan	11.39
D4.2	Pemenuhan wahana budaya tradisional yang telah dimiliki terhadap [illegible] pendidikan	32.27
D4.3	Pemenuhan pemanfaat yang [illegible] dimiliki di [illegible] [illegible]	86.03
D4.4	Pemenuhan pendidik yang [illegible] [illegible]	74.39
D4.5	Pemenuhan pendidik yang [illegible]	19.24
D4.6	Pemenuhan [illegible] yang [illegible]	72.07
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
D5.1	Pemenuhan pendidik yang [illegible] [illegible]	1.87
D5.2	Pemenuhan [illegible] yang [illegible]	12.89
D5.3	Pemenuhan produktif yang [illegible] [illegible]	11.82
D5.4	Pemenuhan pendidik yang [illegible] [illegible]	40.94
D6	Dimensi Budaya Lokal	
D6.1	Pemenuhan produktif yang [illegible] [illegible]	85.93
D6.2	Pemenuhan produktif yang [illegible]	79.84
D6.3	Pemenuhan pendidik yang [illegible]	11.73
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible] [illegible]	51.44
D7.2	Rasio [illegible]	52.45
D7.3	Rasio [illegible]	34.04

3. Provinsi Jawa

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	55.49
D2	Pendidikan	62.68
D3	Kesehatan Sosial Budaya	78.24
D4	Warisan Budaya	57.02
D5	Ekspresi Budaya	35.08
D6	Budaya Literasi	62.01
D7	Gender	52.74
	IPK Provinsi	57.32

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang percaya terhadap adanya pelaku pelestarian budaya/seniman yang menjadikan keberlangsungan budaya sebagai sumber penghidupan	0.22
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0.79
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah yang menilai yang mengintegrasikan yang mengajar kebudayaan dan budaya lokal terhadap total guru	89.15
D2.2	Persentase guru yang mengajar kebudayaan dan budaya lokal terhadap total guru	29.68
D2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelestarian dan/atau pendidikan seni dan budaya yang berbasis tradisional dan informal	44.99
D3	Dimensi Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang menerima jasa asuhan/pengasuh orang dari luar kota yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	85.45
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial bermasyarakat di lingkungan sekitar	89.44
D3.3	Persentase rumah tangga yang menerima asuhan anak berbeda latar belakang pada usia [illegible]	61.07

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Budaya Budaya	
D4.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1.43
D4.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	37.08
D4.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	93.07
D4.4	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	88.28
D4.5	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	12.19
D4.6	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	74.28
D5	Dimensi Tingkat Budaya	
D5.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1.03
D5.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	13.03
D5.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	7.01
D5.4	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	89.42
D6	Dimensi Budaya Umum	
D6.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	51.24
D6.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	72.84
D6.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	9.97
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	88.47
D7.2	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	99.18
D7.3	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	14.08

6. Prestasi Desamera Belajar

a. Nilai Indeks Prestasi pada Desa Mandiri dengan Prestasi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	33,87
D2	Pendidikan	60,21
D3	Kesehatan Sosial Budaya	57,60
D4	Warisan Budaya	66,53
D5	Lingkungan Budaya	33,58
D6	Budaya Lokal	63,54
D7	Gender	61,65
	IPB Prestasi	61,79

b. Nilai Indikator Prestasi Indeks Pembangunan Desa dengan Tingkat Prestasi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melakukan sebagai pendidikan/pembelajaran pertanian dari yang mengadakan interaksi/aktivitas, dan sebagai sumber pengetahuan	0,21
D1.5	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa pendukung budaya lokal pengeluaran konsumsi	0,41
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang memiliki guru yang mengajar materi pelajaran bahasa daerah dan jenis muatan materi	63,06
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa daerah dengan lokal terhadap total guru	33,95
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dalam angkatan pelajaran dan/atau pendidikan, atau dan budaya yang mendukung nasional dan lokal	72,92
D3	Dimensi Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang mengalami dan/atau sebelumnya orang dari usia lah yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	63,37
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti angkatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	62,62
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki minat dan berdasar kepada pada warisan budaya di lingkungan sekitar rumah	63,04

Kode	Nama Indikator	Nilai
IX	Dimensi Budaya Belajar	
IX.1	Persentase [illegible] budaya yang [illegible]	10.60
IX.2	Persentase [illegible] budaya [illegible] yang [illegible]	16.67
IX.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	96.06
IX.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	82.42
IX.5	Persentase [illegible] yang [illegible]	15.72
IX.6	Persentase [illegible] yang [illegible]	68.91
XI	Dimensi Ekonomi Daerah	
XI.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	3.33
XI.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	12.98
XI.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	13.98
XI.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	75.98
XII	Dimensi Sarana Umum	
XII.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	98.08
XII.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	77.92
XII.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	12.39
XIII	Dimensi Gender	
XIII.1	Rasio [illegible]	84.82
XIII.2	Rasio [illegible]	98.96
XIII.3	Rasio [illegible]	51.98

7. Perubah Bangkitan

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Kabupaten

Kode	Nama Kabupaten	Nilai
31	Kabupaten Bulungan	71.84
32	Tana Tidung	67.96
33	Kabupaten Nunukan	70.67
34	Kabupaten Malinau	74.71
35	Kabupaten Bulungan	70.46
36	Kabupaten Lahendong	66.16
37	Kota Tarakan	61.38
IPK Provinsi		70.38

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang merjadikan kesenibudayaan itu sebagai sumber penghasilan	6.17
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk angkutan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	6.00
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang menyelenggarakan pelajaran budaya daerah dan/atau muatan lokal	75.07
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	29.76
D2.3	Persentase penduduk yang berhak dalam kegiatan pelatihan dan/atau pendidikan seni dan budaya yang bersifat nonformal dan informal	60.50
D3	Dimensi Melakukan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang ada anggotanya yang dalam setahun lalu yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	84.24
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83.37
D3.3	Persentase rumah tangga yang menerima akses hak berjalan, hak berdiam pada rumah ibadah di lingkungan sekitar tempat	88.89

Kode	Nama Indikator	Nilai
24	Dimensi Wawasan Pekerja	
24.1	Persentase [illegible] tangganan, [illegible], [illegible] dan [illegible] tinggi [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	4.74
24.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	9.46
24.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	83.24
24.4	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	76.47
24.5	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	20.89
24.6	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	82.98
25	Dimensi Dinamika Pekerja	
25.1	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	1.91
25.2	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	13.69
25.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	8.41
25.4	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	85.80
26	Dimensi Pekerja Informal	
26.1	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	99.22
26.2	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible]	72.25
26.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	93.23
27	Dimensi Gender	
27.1	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	47.83
27.2	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	48.23
27.3	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	28.57

E. Produk Unggulan

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	53.32
D2	Pendidikan	60.41
D3	Ketekunan Sosial Budaya	82.29
D4	Warisan Budaya	59.07
D5	Ekspresi Budaya	56.29
D6	Budaya Literasi	63.23
D7	Gender	58.60
	IPK Provinsi	60.97

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengandung interkulturasi, dan sebagai sasaran pengemasan	0.25
D1.2	Persentase penghasilan masyarakat untuk tinggi cerita lagukan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total penghasilan masyarakat	4.84
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase tenaga pendidikan yang memperoleh gaya yang mengajar materi lokal, bahasa daerah, dan/atau budaya lokalnya	71.46
D2.2	Persentase guru yang memperoleh bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	52.17
D2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelatihan, diskusi, pendidikan, seni dan budaya yang berdasar nilai-nilai lokal dan kearifan	67.60
D3	Domain Ketekunan Budaya Budaya	
D3.1	Persentase tenaga ahli yang ada dan yang mengajar di lingkungan sekolah/kampus	80.78
D3.2	Persentase pendidik yang memiliki sertifikasi di lingkungan sekolah/kampus	87.02
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki minimal satu benda hasil budaya pada tempat tinggal di lingkungan sekolah/kampus	80.99

Kode	Nama Indikator	Nilai
D5	Dimensi Warisan Budaya	
D5.1	Persentase benda, bangunan, situs/kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan terhadap total pemerintah	8.03
D5.2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah dilestarikan terhadap total pemerintah	28.08
D5.3	Persentase produk/jasa yang menggunakan bahan dasar/motif/ciri khas daerah di masyarakat dalam pengadaan (dalam %)	78.78
D5.4	Persentase produksi/jasa yang memiliki sertifikat keunggulan produk/jasa/ciri khas	88.78
D5.5	Persentase produksi/jasa yang menggunakan sertifikat merek/hak cipta/hak paten	16.38
D5.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan motif/ciri tradisional	88.82
D6	Dimensi Ekonomi Budaya	
D6.1	Persentase produksi/jasa yang memiliki keilmuan sebagai pelestari/pendukung pertunjukan seni	1.78
D6.2	Persentase rumah tangga yang mewariskan/mengajarkan keterampilan	12.75
D6.3	Persentase produksi/jasa yang memadukan ekonomi tradisional dan/atau pemanfaatan teknologi	11.39
D6.4	Persentase produksi/jasa yang memiliki ciri khas dan/atau nilai estetika/filosofi/etnisitas/kearifan lokal/nilai di masyarakat	80.60
D8	Dimensi Budaya Literasi	
D8.1	Persentase produksi/jasa yang memiliki nilai/ciri khas/nilai estetika/filosofi/etnisitas/kearifan lokal	92.67
D8.2	Persentase produksi/jasa yang menggunakan literasi	74.21
D8.3	Persentase produksi/jasa yang menggunakan pengemasan/konten/aplikasi berbasis budaya/etnisitas	10.25
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	65.75
D7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMA/Sederajat	86.44
D7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.00

4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
   a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi	23,70
D2	Pendidikan	89,33
D3	Kesehatan Sosial Budaya	79,35
D4	Warisan Budaya	61,93
D5	Tinggalan Budaya	42,22
D6	Budaya Digital	71,03
D7	Gender	59,63
	IPK Provinsi	63,79

   b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mengandung konotasi/nilai budaya, dan sebagai penonton pertunjukan	0,20
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0,00
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase tenaga pendidikan yang memiliki/mengajar materi lokal, bahasa daerah, kesenian, maupun tradisi lainnya	88,93
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	89,89
D2.3	Persentase penduduk usia wajib dalam lingkungan satuan pendidikan dan/atau pendidikan non dan informal yang berminat mempelajari budaya lokal	89,11
D3	Dimensi Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang [illegible] dan/atau melakukan gotong royong dalam [illegible] yang melibatkan keluarga di lingkungan sekitar tempat tinggal	80,36
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti [illegible] sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	78,88
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible] [illegible] di lingkungan sekitar tempat [illegible]	77,80

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Nilai-nilai Budaya	
D4.1	Persentase keluarga, kelompok, masyarakat, desa dan kemasan negeri budaya yang telah dilestarikan terhadap total penduduk	28.00
D4.2	Persentase warisan budaya tidaktaraba yang telah dilestarikan terhadap total penduduk	28.66
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	92.90
D4.4	Persentase penduduk yang mencintai negeri budaya/negeri budaya asli	98.44
D4.5	Persentase penduduk yang menganggap penting/gaduh terhadap budaya	14.38
D4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	80.30
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni	2.71
D5.2	Persentase rumah tangga yang mengunjungi/menikmati pertunjukan	24.18
D5.3	Persentase penduduk yang melakukan dokumen tradisional (tari, seni pertunjukan, upacara)	5.78
D5.4	Persentase penduduk yang mencintai seniman dan [illegible] untuk mempertahankan kondisi budaya [illegible] budaya di [illegible]	86.66
D6	Dimensi Budaya Lokal	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible] budaya lokal [illegible] untuk [illegible]	97.31
D6.2	Persentase penduduk yang mengakses [illegible]	76.97
D6.3	Persentase penduduk yang mengajarkan [illegible]	13.68
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible] partisipasi [illegible]	98.07
D7.2	Rasio penduduk [illegible] terhadap [illegible] yang [illegible]	91.66
D7.3	Rasio [illegible] terhadap [illegible]	99.37

IV. Provinsi Kepulauan Riau

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	10,00
D2	Pendidikan	44,69
D3	Ekonomi Berbasis Budaya	80,37
D4	Warisan Budaya	40,37
D5	Ekspresi Budaya	37,40
D6	Budaya Literasi	70,00
D7	Gender	37,42
IPK Provinsi		**40,34**

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah berdiam sebagai pelaku/penikmat pertunjukan atau yang mempublikasikan hasil/karyanya (% sebagai sumber penghasilan)	1,19
D1.2	Persentase penduduk atau kelompok masyarakat yang memiliki organisasi, lembaga atau jasa kebudayaan terhadap total penduduk/kelompok	1,25
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase anggota penduduk yang mempunyai kemampuan lokal budaya daerah dari/atau mendapat kesempatan	60,00
D2.2	Persentase guru yang mengajar budaya dan bahasa lokal terhadap total guru	29,00
D2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelestari dan/atau pendokumentasi seni dari budaya yang berasal dari daerah dan nasional	44,40
D3	Dimensi Ekonomi Berbasis Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki [illegible] yang dari [illegible] dan yang dimanfaatkan [illegible] di lingkungan [illegible] tinggal	94,01
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan seni [illegible] di lingkungan sekitar	79,00
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible] [illegible] di lingkungan sekitar [illegible]	66,00

Kode	Nama Indikator	Nilai
104	Dimensi Pemenuhan Hak Anak	
104.1	Persentase bayi, balita, anak prasekolah, dan anak kelompok usia sekolah yang telah diimunisasi terhadap total penduduknya	46.13
104.2	Persentase balita, bayi, balita/anak yang telah diimunisasi terhadap total penduduknya	55.22
104.3	Persentase penduduk yang mengunjungi fasilitas umum di sekitar atau dalam pengaruh asap rokok	55.73
104.4	Persentase penduduk yang mengunjungi sarana bangunan publik yang [illegible]	97.14
104.5	Persentase penduduk yang mengunjungi [illegible]	13.33
104.6	Persentase rumah tangga yang mengunjungi [illegible]	74.56
105	Dimensi Bidang Hukum	
105.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat [illegible]	3.02
105.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	13.06
105.3	Persentase penduduk yang [illegible]	8.37
105.4	Persentase penduduk yang [illegible]	80.00
106	Dimensi Budaya Lokasi	
106.1	Persentase penduduk yang [illegible]	56.75
106.2	Persentase penduduk yang [illegible]	41.20
106.3	Persentase penduduk yang [illegible]	13.13
107	Dimensi Gender	
107.1	Rasio [illegible]	80.00
107.2	Rasio [illegible]	95.23
107.3	Rasio [illegible]	36.22

11. Provinsi DKI Jakarta

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	73,82
D2	Pendidikan	71,77
D3	Ketahanan Sosial Budaya	76,16
D4	Warisan Budaya	84,68
D5	Ekspresi Budaya	53,41
D6	Budaya Literasi	60,76
D7	Gender	60,66
	IPK Provinsi	68,29

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang percaya artifisial sebagai pelaku/pendukung pemajuan seni yang mendalami seni/budayanya, di sebagai sanggar/perguruan	0,37
D1.2	Persentase penduduk usia lebih rendah dengan tanda kegiatan, barang dan jasa kebudayaan berbasis seni pengetahuan tradisional	1,84
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase tenaga pendidikan yang memenuhi syarat yang memajuan budaya, bahasa, daerah dan/atau nasional tradisional	69,72
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya pada tingkat SD guru	33,43
D2.3	Persentase penduduk yang artifisial dalam kegiatan pelestari dan/atau pemanfaatan seni dan budaya yang memiliki pendidikan dan informal	65,33
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang ada/ada dalam kelompok seni dan nilai yang melestarikan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	93,13
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	78,78
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki cara saat berjalan kaki sendiri/ke pada tetangga di lingkungan sekitar rumah	56,27

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Variasi Budaya	
X4.1	Persentase [illegible] budaya [illegible]	3,84
X4.2	Persentase [illegible] budaya [illegible]	90,10
X4.3	Persentase [illegible]	8,00
X4.4	Persentase [illegible]	74,05
X4.5	Persentase [illegible]	20,40
X4.6	Persentase [illegible]	86,50
D5	Dimensi Bhagwad Budaya	
X5.1	Persentase [illegible]	1,98
X5.2	Persentase [illegible]	8,00
X5.3	Persentase [illegible]	7,00
X5.4	Persentase [illegible]	86,27
D6	Dimensi Budaya Cinta	
X6.1	Persentase [illegible]	65,20
X6.2	Persentase [illegible]	90,37
X6.3	Persentase [illegible]	22,55
D7	Dimensi Gotong	
X7.1	Rasio [illegible]	83,84
X7.2	Rasio [illegible]	89,65
X7.3	Rasio [illegible]	83,00

13. Provinsi Jawa Barat

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	28,37
D2	Pendidikan	75,00
D3	Keberlanjutan Hasil Budaya	80,00
D4	Warisan Budaya	85,00
D5	Ekspresi Budaya	37,83
D6	Budaya Literasi	85,83
D7	Gender	80,72
IPK Provinsi		80,21

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat orang-orang pertunjukan seni yang mengandung unsur budaya, dan orang-orang seniman yang ada	0,00
D1.2	Persentase penduduk berusia lima tahun ke atas yang [illegible]	4,81
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase anak usia pendidikan yang mengunjungi [illegible]	00,00
D2.2	Persentase guru yang mengajar [illegible]	41,00
D2.3	Persentase peserta didik yang telah [illegible]	00,00
D3	Domain Keberlanjutan Hasil Budaya	
D3.1	Persentase [illegible]	77,00
D3.2	Persentase [illegible]	00,00
D3.3	Persentase [illegible]	00,00

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Budaya Tertulis	
D4.1	Prevalensi berita, langganan, aktivitas, atau dan komunitas negara berbahasa yang telah diterjemahkan terhadap total penduduknya	6.80
D4.2	Prevalensi rumahan berbahasa berbahasa yang telah diterjemahkan terhadap total penduduknya	17.87
D4.3	Prevalensi penduduk yang menggunakan bahasa domisili di rumah atau [illegible]	72.80
D4.4	Prevalensi penduduk yang mendengar secara langsung pertunjukan asing	75.60
D4.5	Prevalensi penduduk yang mengunjungi perpustakaan negara [illegible] domisili	20.75
D4.6	Prevalensi rumah tangga yang menggunakan [illegible]	86.75
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
D5.1	Prevalensi penduduk yang pernah melihat [illegible]	3.96
D5.2	Prevalensi rumah tangga yang menggunakan [illegible]	10.37
D5.3	Prevalensi penduduk yang melakukan [illegible]	7.87
D5.4	Prevalensi penduduk yang [illegible]	86.77
D6	Dimensi Budaya Lokasi	
D6.1	Prevalensi penduduk yang mendengar [illegible]	81.32
D6.2	Prevalensi penduduk yang mengunjungi [illegible]	70.11
D6.3	Prevalensi penduduk yang mengunjungi [illegible]	11.47
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	80.60
D7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki [illegible]	82.37
D7.3	Rasio tingkat pendidikan perempuan terhadap tingkat pendidikan [illegible]	23.71

13. Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah Provinsi [illegible]

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah Provinsi [illegible]

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	26,97
D2	Pendidikan	79,91
D3	Kebebasan Berekspresi Budaya	79,20
D4	Warisan Budaya	91,24
D5	Dimensi Budaya	42,89
D6	Budaya Digital	83,38
D7	Gender	58,84
IPK Provinsi		**63,05**

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Pemanfaatan pendidikan yang permasalahkan sebagai pelajar/mahasiswa yang [illegible] (% sebagai sumber penghasilan)	0,26
D1.2	Pemanfaatan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk [illegible] barang dan jasa budayanya terhadap total pengeluaran konsumsi	6,18
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Pemanfaatan semua pendidikan yang [illegible] guru yang [illegible] [illegible] [illegible]	88,24
D2.2	Pemanfaatan guru yang [illegible] [illegible] [illegible]	46,27
D2.3	Pemanfaatan pendidikan yang [illegible] [illegible] [illegible]	84,74
D3	Dimensi Kebebasan Sosial Budaya	
D3.1	Pemanfaatan rumah tangga yang [illegible] [illegible]	77,77
D3.2	Pemanfaatan penduduk yang [illegible] [illegible]	80,77
D3.3	Pemanfaatan rumah tangga yang [illegible] [illegible]	79,33

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
D4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	[illegible]
D4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	17.61
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	[illegible]
D4.4	Persentase penduduk yang [illegible]	79.61
D4.5	Persentase penduduk yang [illegible]	16.42
D4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	61.23
D5	Dimensi Cagar Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah melihat situs/bangunan/[illegible]	4.24
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	27.11
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible]	0.93
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	86.99
D6	Dimensi Budaya Digital	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible]	52.14
D6.2	Persentase penduduk yang [illegible]	73.38
D6.3	Persentase penduduk yang [illegible]	83.66
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Skor [illegible]	73.17
D7.2	Skor [illegible]	82.51
D7.3	Skor [illegible]	21.43

H. Provinsi DI Yogyakarta

a. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Tingkat Pendidikan menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Kependudukan	77,86
D2	Dimensi Pendidikan	86,03
D3	Dimensi Kesehatan Reproduksi Remaja	80,83
D4	Dimensi Ketahanan Ekonomi	74,45
D5	Dimensi Perlindungan Keluarga	94,64
D6	Dimensi Lingkungan	77,08
D7	Dimensi Gender	65,97
IPK Provinsi		77,18

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Keluarga dan Tingkat Pendidikan

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Kependudukan Remaja	
D1.1	Persentase penduduk usia produktif terhadap usia tidak produktif (penduduk usia produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas)	0,47
D1.2	Persentase penduduk perempuan berumur reproduksi (15-49 tahun) yang belum kawin, kawin dan pernah kawin terhadap total penduduk perempuan berumur reproduksi	0,56
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase rasio guru pendidikan yang memenuhi syarat terhadap jumlah guru yang mengajar di satuan pendidikan formal dan non formal	0,80
D2.2	Persentase guru yang mengajar di satuan pendidikan formal dan non formal telah memenuhi standar guru	0,83
D2.3	Persentase penduduk usia produktif yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan non formal yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya	0,90
D3	Dimensi Kesehatan Remaja Reproduksi	
D3.1	Persentase remaja usia 10-24 tahun yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis	0,85
D3.2	Persentase remaja usia 10-24 tahun yang mengetahui hubungan seksual dengan lawan jenis di luar nikah	0,80
D3.3	Persentase remaja usia 10-24 tahun yang mengetahui cara-cara hubungan seksual dengan lawan jenis di luar nikah	0,80

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Budaya Kalsel	
D4.1	Persentase [illegible] [illegible] yang telah dilestarikan terhadap total penduduk	[illegible]
D4.2	Persentase warisan budaya nasional yang telah dilestarikan terhadap total penduduk	[illegible]
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah [illegible]	[illegible]
D4.4	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D4.5	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D4.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	[illegible]
D5	Dimensi Ekonomi Kalsel	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah [illegible]	[illegible]
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	[illegible]
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D6	Dimensi Kalsel Unggul	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D6.2	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D6.3	Persentase penduduk yang [illegible]	[illegible]
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible]	[illegible]
D7.2	Rasio [illegible]	[illegible]
D7.3	Rasio [illegible]	[illegible]

13. Provinsi Jawa Timur

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	84,79
D2	Pendidikan	85,71
D3	Kesehatan Sosial Budaya	76,71
D4	Warisan Budaya	50,21
D5	Ekspresi Budaya	81,44
D6	Budaya Literasi	90,84
D7	Gender	90,07
IPK Provinsi		83,00

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengandung unsur/substansi, D.1 sebagai sumber penyusunnya	0,31
D1.3	Persentase penghasilan rumahtangga rumah tangga (untuk keperluan barang dan jasa konsumsi) terhadap total penghasilan rumahtangga	4,99
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah, penduduk yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal/ kebudayaan daerah dan/atau muatan pemerintah	88,68
D2.2	Persentase guru yang mengajar kebudayaan dan kearifan lokal terhadap total guru	39,68
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dalam kegiatan pelatihan dan/atau kursus/pendidikan seni dan budaya yang mendukung pelestarian budaya	81,44
D3	Domain Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang mengajarkan nilai-nilai/ajaran yang dari nilai-nilai yang mendukung kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	71,21
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	88,28
D3.3	Persentase rumah tangga yang menerima akses sosial berupa kaki mendukung pada acara hari di lingkungan sekitar rumah	88,02

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
D4.1	Pemanfaatan bahasa, kesenian, arsitektur, adat dan lainnya sebagai warisan budaya yang telah dikembangkan berbasis teknologi informasi	8,71
D4.2	Pemanfaatan warisan budaya tradisional yang telah dikembangkan berbasis teknologi informasi	14,07
D4.3	Pemanfaatan produktif yang menggunakan sumber daya [illegible]	94,80
D4.4	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	78,38
D4.5	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	15,00
D4.6	Pemanfaatan [illegible] yang menggunakan produk [illegible]	87,84
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
D5.1	Pemanfaatan produktif yang [illegible] sebagai [illegible]	5,36
D5.2	Pemanfaatan [illegible] yang [illegible]	40,74
D5.3	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	8,20
D5.4	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	85,97
D6	Dimensi Budaya Lokal	
D6.1	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	46,74
D6.2	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	75,11
D6.3	Pemanfaatan produktif yang [illegible]	55,95
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Nilai [illegible]	75,00
D7.2	Nilai [illegible]	85,95
D7.3	Nilai [illegible]	55,00

IX. Provinsi Banten

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	23,92
D2	Pendidikan	65,61
D3	Ketahanan Nilai Budaya	67,29
D4	Warisan Budaya	57,23
D5	Dagangan Budaya	42,61
D6	Budaya Digital	64,84
D7	Gender	52,15
IPK Provinsi		56,73

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai penonton/pendengar pertunjukan seni yang mengandung konotasi budaya dan sebagai narasumber pengisi acara	0,19
D1.2	Persentase penghasilan konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0,70
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang menyediakan guru yang mengajar materi lokal budaya dalam kurikulum muatan lokalnya	51,17
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	53,99
D2.3	Persentase pustakawan yang melihat dalam kegiatan pelestarian dan/atau pemanfaatan nilai dan budaya yang bersifat konformasi dan informasi	93,55
D3	Domain Ketahanan Nilai Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang menyajikan adat istiadat/upacara yang dari suku lain yang berkunjung/tinggal di lingkungan sekitar tempat tinggal	71,71
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83,28
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki anggota keluarga lebih dari satu/lebih pada rentang usia produktif di lingkungan sekitar tempat	44,39

Kode	Nama Indikator	Bobot
D1	Dimensi Nilai Budaya	
X1.1	Pemahaman [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] yang telah dilakukan terhadap [illegible] pendidikan	4.17
X1.2	Pemahaman [illegible] budaya [illegible] yang telah dilakukan terhadap [illegible] pendidikan	21.81
X1.3	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	83.41
X1.4	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	75.39
X1.5	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible]	27.21
X1.6	Pemahaman [illegible] yang [illegible]	86.08
D2	Dimensi Empati Budaya	
X2.1	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	2.80
X2.2	Pemahaman [illegible] yang [illegible]	26.92
X2.3	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible]	9.89
X2.4	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	83.58
D3	Dimensi Berbasis Layanan	
X3.1	Pemahaman [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]	52.28
X3.2	Pemahaman [illegible] yang [illegible]	77.81
X3.3	Pemahaman [illegible] yang [illegible]	1.18
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rata-rata [illegible] [illegible] [illegible]	84.05
X7.2	Rata-rata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	81.22
X7.3	Rata-rata [illegible] [illegible] [illegible]	16.24

17. Provinsi Bali

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi	82,79
D2	Pendidikan	90,42
D3	Ketekunan Hidup Budaya	79,82
D4	Pergaulan Budaya	84,20
D5	Ekspresi Budaya	41,40
D6	Budaya Literasi	73,39
D7	Gender	61,21
	IPK Provinsi	**70,65**

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Pengeluaran masyarakat untuk pangan [illegible]	0,88
D1.2	Pengeluaran [illegible]	0,18
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible]	79,38
D2.2	Persentase guru [illegible]	94,31
D2.3	Persentase [illegible]	88,99
D3	Dimensi Ketekunan Hidup Budaya	
D3.1	Persentase [illegible]	81,00
D3.2	Persentase [illegible]	85,16
D3.3	Persentase [illegible]	75,29

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
D4.1	Pemeliharaan bentuk, komposisi, [illegible] dan lanskap cagar budaya yang telah dikonservasi terhadap total [illegible]	[illegible]
D4.2	Pemeliharaan warisan budaya takbendawi yang telah dikonservasi terhadap total [illegible]	[illegible]
D4.3	Pemeliharaan produktivitas yang menggunakan bahan [illegible] di rumah [illegible]	[illegible]
D4.4	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D4.5	Pemeliharaan produktivitas yang menggunakan [illegible]	[illegible]
D4.6	Pemeliharaan rumah tinggal yang menggunakan [illegible]	[illegible]
D5	Dimensi Ekspresi Budaya	
D5.1	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D5.2	Pemeliharaan rumah tinggal yang [illegible]	[illegible]
D5.3	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D5.4	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D6	Dimensi Budaya Lokasi	
D6.1	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D6.2	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D6.3	Pemeliharaan produktivitas yang [illegible]	[illegible]
D7	Dimensi Gender	
D7.1	[illegible]	[illegible]
D7.2	[illegible]	[illegible]
D7.3	[illegible]	[illegible]

18. Provinsi Nusa Tenggara Timur

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	47.13
D2	Pendidikan	69.46
D3	Keadaan Sosial Budaya	76.39
D4	Warisan Budaya	38.18
D5	Ekspresi Budaya	45.41
D6	Budaya Literasi	52.99
D7	Gender	53.09
IPK Provinsi		60.41

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat adanya pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengadilkan interlokutornya 3x sebagai sumber pengetahuan	0.50
D1.2	Persentase penduduk usia minimal rumah tangga rumah tangganya, bersama dan jika berkunjungan terhadap nilai pengetahuan tradisional	4.00
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar materi [illegible]	75.44
D2.2	Persentase guru yang mengajar [illegible] dan budaya lokal terhadap [illegible]	52.28
D2.3	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible]	69.09
D3	Dimensi Keadaan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang [illegible] [illegible]	78.48
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti [illegible]	91.51
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible]	78.22

Kode	Nama Indikator	Bobot
D4	Dimensi Variasi Bahasa	
D4.1	Penyajian bentuk, komposisi, [illegible] atau dan bersesuai, cagar budaya yang telah dikenalkan terhadap usia pendidikan.	3.77
D4.2	Penyajian materi cagar budaya [illegible] yang telah dikenalkan terhadap usia pendidikan.	3.74
D4.3	Penyajian pendidik yang menggunakan bahasa daerah di [illegible] dan dalam pembelajaran [illegible]	87.93
D4.4	Penyajian pendidik yang menyertakan [illegible] secara langsung pengajaran [illegible]	93.49
D4.5	Penyajian pendidik yang [illegible] penanggulan [illegible]	11.88
D4.6	Penyajian [illegible] yang menggunakan [illegible]	88.08
D5	Dimensi Bagaya Budaya	
D5.1	Penyajian pendidik yang [illegible] [illegible] sebagai [illegible]	3.49
D5.2	Penyajian [illegible] yang menyelenggarakan [illegible]	22.82
D5.3	Penyajian pendidik yang [illegible] [illegible]	12.90
D5.4	Penyajian pendidik yang [illegible] dan [illegible] [illegible] budaya [illegible]	76.20
D6	Dimensi Budaya Gizi	
D6.1	Penyajian pendidik yang [illegible] [illegible]	49.18
D6.2	Penyajian pendidik yang [illegible]	68.54
D6.3	Penyajian pendidik yang [illegible]	13.08
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Sesuai [illegible] pendidik [illegible]	78.08
D7.2	Sesuai pendidik [illegible] [illegible]	76.08
D7.3	Sesuai [illegible] pendidik [illegible]	7.28

II. Nominal Rata Tunggal Nilai:

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi tahunan Nominal

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	13.13
D2	Pendidikan	02.36
D3	Kesehatan Sosial Budaya	01.09
D4	Warisan Budaya	44.09
D5	Ekonomi Budaya	20.96
D6	Budaya Digital	04.96
D7	Gender	00.00
IPK Provinsi		01.09

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat, sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengandung interkulturalitas dan sebagai sasaran tinggalkan	0.00
D1.2	Persentase penduduk usia konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa untuk/sesuai budaya lokal, penghasilan tertentu	0.21
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang mengajarkan guru yang mengajar materi budaya lokal dan/atau daerah dan/atau nasional tertentu	00.36
D2.2	Persentase guru yang mengajar budaya dan materi lokal tertentu oleh guru	00.00
D2.3	Persentase pendidikan yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan/atau pendidikan seni dan budaya yang berdiri sendiri, dan dibiayai	01.41
D3	Dimensi Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang setiap hari ada anggotanya yang dari waktu lain yang berkebutuhan anggotan di lingkungan sekitar tempat tinggal	01.32
D3.2	Persentase penduduk yang mengajak kegiatan sosial kemanusiaan di lingkungan sekitar	00.03
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki anggota usia di bawah usia sekolah pada usia di lingkungan sekitar rumah	02.02

Kode	Nama Indikator	Nilai
[illegible]	Dimensi Wawasan Budaya	
[illegible]	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible] budaya [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Dimensi Ekspresi Budaya	
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Dimensi Budaya Literasi	
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Persentase pendidik yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Dimensi Gender	
[illegible]	Rata-rata [illegible] pendidikan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Rata-rata pendidik perempuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]
[illegible]	Rata-rata [illegible] pendidik perempuan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]

IX. Provinsi Kalimantan Barat

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi tahunan Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	17,11
D2	Pendidikan	58,44
D3	Keahlian Sosial Budaya	77,44
D4	Warisan Budaya	58,48
D5	Bhinneka Budaya	38,09
D6	Budaya Literasi	66,13
D7	Gender	58,90
IPK Provinsi		55,64

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Penduduk perdesaan yang pernah berkunjung sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni, yang menjadikan kesenian/seniman, dan sebagai kesenian pengunjung	0,00
D1.2	Penduduk perdesaan yang [illegible] masyarakat sangat [illegible] barang dan jasa kebudayaan terhadap kesal pengkonsumsi [illegible]	2,43
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Penduduk usia pendidikan yang [illegible] guru yang [illegible] [illegible] dasar dan [illegible] [illegible]	52,18
D2.2	Penduduk guru yang [illegible] [illegible]	28,07
D2.3	Penduduk pendidik yang [illegible] [illegible] pendidikan [illegible] pendidikan seni, dan budaya yang [illegible] [illegible]	52,13
D3	Dimensi Keahlian Sosial Budaya	
D3.1	Penduduk rumah tangga yang [illegible] [illegible] [illegible]	51,40
D3.2	Penduduk [illegible] yang [illegible] [illegible]	83,05
D3.3	Penduduk rumah tangga yang [illegible] [illegible]	88,83

Kode	Nama Indikator	Nilai
D6	Dimensi Waktu Tunggu	
D6.1	Persentase rumah tangga pengguna, [illegible], atau dua layanan cagar budaya yang telah dikunjungi terhadap total penduduk	11,13
D6.2	Persentase rumah tangga [illegible] yang telah dikunjungi terhadap total penduduk	11,81
D6.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	82,74
D6.4	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible]	91,90
D6.5	Persentase penduduk yang mengunjungi [illegible]	15,34
D6.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	78,68
D7	Dimensi Bimbingan Belajar	
D7.1	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible]	1,28
D7.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	10,97
D7.3	Persentase penduduk yang [illegible]	9,37
D7.4	Persentase penduduk yang [illegible]	86,70
D8	Dimensi Budaya Literasi	
D8.1	Persentase penduduk yang [illegible]	51,26
D8.2	Persentase penduduk yang [illegible]	93,35
D8.3	Persentase penduduk yang [illegible]	8,66
D9	Dimensi Gender	
D9.1	Rasio [illegible]	62,79
D9.2	Rasio [illegible]	86,26
D9.3	Rasio [illegible]	27,49

D. Provinsi Kalimantan Tengah

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	35.98
D2	Pendidikan	67.01
D3	Dimensi Sosial Budaya	61.28
D4	Partisipasi Budaya	52.41
D5	Dimensi Budaya	32.97
D6	Budaya Digital	68.74
D7	Gender	38.20
	IPK Provinsi	50.53

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Presentasi penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penyelenggara pertunjukan seni yang menjadikan keberlikatannya (X) sebagai sumber penghasilan	0.23
D1.2	Presentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa berkebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	1.00
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Presentase tenaga pendidikan yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi terhadap total guru	67.17
D2.2	Presentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	34.69
D2.3	Presentase penduduk yang berhak dalam kegiatan pendidikan dan budaya pendidikan dan budaya yang berpilar konservasi, dan informasi	61.28
D3	Dimensi Sosial Budaya Sosial Budaya	
D3.1	Presentase rumah tangga yang ada anggota keluarga yang dari waktu lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	44.24
D3.2	Presentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	65.72
D3.3	Presentase rumah tangga yang memiliki anggota keluarga yang pernah melakukan pada rentang waktu di lingkungan sekitar tempat	63.74

Kode	Nama Indikator	Nilai
D6	Dimensi Wahana Fasilitas	
D6.1	Persentase hotels, bangunan, struktur, atau dan kawasan cagar budaya yang telah dilindungi terhadap total penduduk	85.24
D6.2	Persentase wahana fasilitas [illegible] yang telah dilindungi terhadap total penduduk	4.76
D6.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	84.21
D6.4	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible]	72.11
D6.5	Persentase penduduk yang menggunakan [illegible]	9.21
D6.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan [illegible]	81.68
D5	Dimensi Sosial Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah [illegible] [illegible]	2.92
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	9.44
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible] [illegible]	7.67
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	61.87
D4	Dimensi Budaya Lokal	
D4.1	Persentase penduduk yang [illegible]	48.78
D4.2	Persentase penduduk yang [illegible]	77.48
D4.3	Persentase penduduk yang [illegible]	8.78
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	57.34
D7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	96.28
D7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	25.56

22. Provinsi Kalimantan Selatan

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	59,02
D2	Pendidikan	61,98
D3	Dimensi Sosial Budaya	75,02
D4	Warisan Budaya	59,29
D5	Ekspresi Budaya	53,98
D6	Budaya Literasi	67,08
D7	Gender	57,38
IPK Provinsi		65,15

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang mengadopsi unsur budayanya (% sebagai sumber pendapatan)	0,25
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk (rokok, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi)	4,68
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase sarana pendidikan yang mencantumkan guru yang mengajar muatan lokal budaya daerah dan/atau muatan lokal	64,70
D2.2	Persentase guru yang mengajar muatan lokal budaya dan/atau muatan lokal budaya yang guru	38,33
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dalam kegiatan pelestari dan/atau pendidikan seni dan budaya yang berbasis masyarakat dan informal	46,37
D3	Dimensi Kebudayaan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang setuju dan sangat setuju orang dari suku lain yang pindah/datang tinggal di lingkungan sekitar tempat tinggal	84,37
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	83,56
D3.3	Persentase rumah tangga yang sesama anggota rumah berjalan baik (rukun) pada tahun lalu di lingkungan sekitar rumah	87,52

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Pelayanan Budaya	
D4.1	Persentase kesah, lungsuran, arsitektur, atau dll. kawasan cagar budaya yang telah dimanfaatkan terhadap total penduduk	10.08
D4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah dimanfaatkan terhadap total penduduk	14.32
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	98.02
D4.4	Persentase penduduk yang konsumsi secara langsung pangan lokal	72.07
D4.5	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/museum/situs	13.14
D4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan pakaian tradisional	87.58
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.07
D5.2	Persentase rumah tangga yang mempedagangkan tiga jenis produk	18.13
D5.3	Persentase penduduk yang melakukan dokumentasi tradisional dan/atau pewarisan budaya	9.69
D5.4	Persentase penduduk yang merasa senang dan/atau bangga saat mengenakan kreasi/ekspresi budaya (pengkhususan budaya) di ruang publik	88.94
D6	Dimensi Budaya Literasi	
D6.1	Persentase penduduk yang membaca teks tulis atau tulis untuk tujuan informasi	88.28
D6.2	Persentase penduduk yang mengakses internet	75.84
D6.3	Persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/museum/galeri/ruang kesenian/ruang publik	11.38
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	88.94
D7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki jaminan sosial (BPJS/Badan)	82.25
D7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	26.08

21. Provinsi Sulawesi Tengah

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi tahun [illegible]

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	35.72
D2	Pendidikan	67.94
D3	Kebudayaan Sosial Ekonomi	77.22
D4	Warisan Budaya	39.13
D5	Ekspresi Budaya	32.39
D6	Budaya Literasi	72.42
D7	Gender	54.94
	IPK Provinsi	54.75

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Ekspresi Budaya Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat atau/dan pelajari/pelajari/pelajari/pelajari atau yang menjadikan [illegible] sebagai sumber pengetahuan	8.07
D1.2	Persentase penduduk [illegible]	4.00
D2	Ekspresi Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible]	87.17
D2.2	Persentase [illegible]	84.81
D2.3	Persentase [illegible]	71.84
D3	Ekspresi Budaya Sosial Budaya	
D3.1	Persentase [illegible]	92.46
D3.2	Persentase [illegible]	77.12
D3.3	Persentase [illegible]	62.18

Kode	Nama Indikator	Nilai
[illegible]	Dimensi Partisipasi Budaya	
[illegible]	Persentase [illegible]	0,77
[illegible]	Persentase [illegible]	14,77
[illegible]	Persentase [illegible]	27,53
[illegible]	Persentase [illegible]	49,77
[illegible]	Persentase [illegible]	0,69
[illegible]	Persentase [illegible]	40,92
[illegible]	Dimensi Ekspresi Budaya	
[illegible]	Persentase [illegible]	1,81
[illegible]	Persentase [illegible]	11,59
[illegible]	Persentase [illegible]	8,13
[illegible]	Persentase [illegible]	46,98
[illegible]	Dimensi Budaya Literasi	
[illegible]	Persentase [illegible]	56,97
[illegible]	Persentase [illegible]	46,53
[illegible]	Persentase [illegible]	13,42
[illegible]	Dimensi Gender	
[illegible]	Rasio [illegible]	98,98
[illegible]	Rasio [illegible]	49,28
[illegible]	Rasio [illegible]	17,00

24. Provinsi Kalimantan Utara

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	23,87
D2	Pendidikan	87,89
D3	Kesehatan Sosial Budaya	75,62
D4	Warisan Budaya	40,03
D5	Ruang Budaya	33,43
D6	Budaya Digital	63,71
D7	Gender	56,35
IK Provinsi		52,00

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk usia produktif yang pernah terlibat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang menyelenggarakan/dimainkan/ada sebagai anggota penghadiri	0,24
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa terhadap/atas total kota pengeluaran konsumsi	3,18
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase rata-rata pendidikan yang mempengaruhi guru yang memiliki standar nilai kelulus akademik dan/atau standar kompetensi	38,64
D2.2	Persentase guru yang mengajar kelas dan/atau kelas/ terhadap/ruang guru	27,68
D2.3	Persentase penduduk usia yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pendidikan seni dan budaya yang berbasis/berdasar seni dan budaya	20,80
D3	Domain Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang sehat/jika ada sakit/ketahui orang/ dari mana dan yang mendekatkan/ungkapan di lingkungan sekitar/ungkap/digal	84,14
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	79,94
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki/ada/ada/terjadi kasus/ketahui/ada/ada/ketahui/ada di lingkungan sekitar/rumah	83,28

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Budaya Daerah	
D4.1	Persentase [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible]	1,36
D4.2	Persentase [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible]	22,19
D4.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible]	19,21
D4.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	37,20
D4.5	Persentase [illegible] yang [illegible]	18,04
D4.6	Persentase [illegible] yang [illegible]	11,97
D5	Dimensi Kaum [illegible]	
D5.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	3,57
D5.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	18,08
D5.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	11,28
D5.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	68,06
D6	Dimensi Bencana Alamiah	
D6.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	46,75
D6.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	46,27
D6.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	11,38
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible] [illegible]	46,23
D7.2	Rasio [illegible] [illegible]	47,86
D7.3	Rasio [illegible] [illegible]	35,69

33. Pemerintah Kabupaten Cianjur

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	58,16
D2	Pendidikan	60,71
D3	Sosial Budaya	63,34
D4	Warisan Budaya	45,60
D5	Ekspresi Budaya	55,40
D6	Budaya Digital	64,00
D7	Gender	82,64
IPK Provinsi		55,32

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat [illegible]	0,11
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk [illegible]	7,28
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang [illegible]	59,27
D2.2	Persentase guru yang [illegible]	29,68
D2.3	Persentase penduduk yang [illegible]	68,38
D3	Domain Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang [illegible]	91,28
D3.2	Persentase penduduk yang [illegible]	91,31
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible]	97,34

Kode	Pernyataan	Bobot
D4	Dimensi Nilai Budaya	
D4.1	Pemahaman [illegible] budaya [illegible]	[illegible]
D4.2	Pemahaman nilai budaya [illegible]	[illegible]
D4.3	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D4.4	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D4.5	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D4.6	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D5	Dimensi Dampak Budaya	
D5.1	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D5.2	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D5.3	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D5.4	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D6	Dimensi Budaya Umum	
D6.1	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D6.2	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D6.3	Pemahaman [illegible]	[illegible]
D7	Dimensi Gender	
D7.1	[illegible]	[illegible]
D7.2	[illegible]	[illegible]
D7.3	[illegible]	[illegible]

20. Provinsi Kalimantan Tengah

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah Provinsi [illegible] Tahunan

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	20,31
D2	Pendidikan	80,61
D3	Ketekunan Sosial Budaya	78,27
D4	Warisan Budaya	84,47
D5	Empresi Budaya	40,10
D6	Barang Umum	62,49
D7	Gender	85,14
IPB Provinsi		82,95

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase masyarakat yang pernah melihat sebagai penonton/pendengar pertunjukan seni yang mengandung [illegible]	11,79
D1.2	Persentase pengrajin/[illegible] tenaga [illegible] [illegible] dan jasa kebudayaan [illegible]	2,75
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah [illegible] yang [illegible] guru yang [illegible]	94,50
D2.2	Persentase guru yang [illegible] dan [illegible]	27,67
D2.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	84,09
D4	Domain Ketekunan Sosial Budaya	
D4.1	Persentase [illegible]	91,66
D4.2	Persentase [illegible]	88,28
D4.3	Persentase [illegible]	88,18

Kode	Nama indikator	Bilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Pemanfaatan [illegible], bangunan, arsitektur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dikembangkan terhadap [illegible] pariwisata	4.00
X4.2	Pemanfaatan warisan budaya tak benda yang telah dikemasan terhadap [illegible] pariwisata	12.00
X4.3	Pemanfaatan produksi yang menggunakan bahan baku di [illegible] [illegible]	20.00
X4.4	Pemanfaatan pendidik yang [illegible] [illegible]	71.00
X4.5	Pemanfaatan pendidik yang mengajarkan pelanggan [illegible]	8.00
X4.6	Pemanfaatan [illegible] yang menggunakan produk tradisional	67.00
D5	Dimensi Ekonomi Budaya	
X5.1	Pemanfaatan pendidik yang [illegible] tradisional [illegible]	5.11
X5.2	Pemanfaatan [illegible] yang menggunakan [illegible]	35.79
X5.3	Pemanfaatan produksi yang [illegible] [illegible]	8.00
X5.4	Pemanfaatan pendidik yang [illegible] [illegible]	85.65
D6	Dimensi Budaya Inovasi	
X6.1	Pemanfaatan produksi yang [illegible] [illegible]	55.74
X6.2	Pemanfaatan produksi yang [illegible]	65.12
X6.3	Pemanfaatan pendidik yang mengajarkan [illegible]	15.00
D7	Dimensi Creator	
X7.1	Rasio tingkat partisipasi [illegible] [illegible]	65.00
X7.2	Rasio pendidik [illegible] [illegible]	65.79
X7.3	Rasio [illegible] [illegible]	34.10

IV. Provinsi Kalimantan Selatan

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Warisan	51,40
D2	Pendidikan	72,36
D3	Ketekunan Sosial Budaya	75,92
D4	Warisan Budaya	48,82
D5	Ekspresi Budaya	35,48
D6	Budaya Digital	64,71
D7	Gender	63,03
	IPK Provinsi	57,73

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Dimensi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah ziarah sebagai peziarah/penziarah pertanyaan ini, yang menjawab [illegible] ini sebagai [illegible]	0,37
D1.2	Persentase pengeluaran rumah tangga untuk [illegible] barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0,02
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible] pendidikan yang [illegible] guru yang mengajar [illegible]	60,72
D2.2	Persentase guru yang mengajar [illegible]	55,62
D2.3	Persentase penduduk yang [illegible]	55,00
D3	Dimensi Ketekunan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang [illegible]	80,66
D3.2	Persentase penduduk yang [illegible]	77,28
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible]	68,38

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi "Pemilik Budaya"	
D4.1	Persentase benda, bangunan, situs/kawasan, atau dan komunitas cagar budaya yang telah dimanfaat terhadap total penduduk	3,86
D4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah dikenalkan terhadap total penduduk	32,68
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	69,06
D4.4	Persentase penduduk yang [illegible]	66,39
D4.5	Persentase penduduk yang [illegible]	9,37
D4.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	73,64
D5	Dimensi "Ekspresi Budaya"	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah [illegible]	1,49
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	19,08
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible]	6,76
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	40,30
D6	Dimensi "Budaya Urban"	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible]	31,03
D6.2	Persentase penduduk yang [illegible]	71,94
D6.3	Persentase penduduk yang [illegible]	12,28
D7	Dimensi "Jejaring"	
D7.1	Rata-rata [illegible]	63,88
D7.2	Rata-rata [illegible]	92,34
D7.3	Rata-rata [illegible]	32,81

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	20,73
D2	Pendidikan	47,85
D3	Kebudayaan Sosial Budaya	75,69
D4	Warisan Budaya	30,39
D5	Ungkapan Budaya	23,32
D6	Budaya Literasi	63,03
D7	Gender	66,08
IPK Provinsi		56,58

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk usia pensiun berdasar ketiadaan sumber penghasilan, serta usia yang mengindikasi ketidakmampuan dan sebagai sumber penghasilan	0,07
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	0,80
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar seluruh jam belajar, dasar (SD/sederajat) dan menengah (SMP/sederajat)	75,38
D2.2	Persentase guru yang mengajar hiburan dan budaya lokal (tari/lagu/alat musik/gita)	27,87
D2.3	Persentase pendidik yang terlibat dalam kegiatan pelatihan (seminar/pendidikan/pelatihan) seni dan budaya yang berdasar pendidikan dan informal	66,98
D3	Domain Kebudayaan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang tetap jika ada anggota orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	90,06
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	79,90
D3.3	Persentase rumah tangga yang menganggap suku lain berbeda baik sesuatu yang pada umumnya berlaku lingkungan sekitar rumah	96,07

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Pelayan Budaya	
D4.1	Persentase [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

10. Provinsi Gorontalo

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	83,15
D2	Pendidikan	85,23
D3	Ketekunan Sosial Budaya	71,42
D4	Warisan Budaya	80,55
D5	Lingkungan Budaya	83,27
D6	Budaya Digital	60,23
D7	Gender	65,95
	IPK Provinsi	74,23

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase produksi yang provinsi artikel ormasi pelaku/pendidikan pertunjukan seni yang mendaftar dan/atau/atau dan sebagai sumber penghasilan	0,29
D1.2	Persentase penduduk konsumsi rumah tangga untuk kegiatan, barang dan jasa budayanya terhadap total pengeluaran konsumsi	4,69
D2	Ekspresi Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang mengajarkan guru yang mengajar materi lokal budaya daerah dan/atau daerah lainnya	47,34
D2.2	Persentase guru yang mengajar kelas dan budaya lokal terhadap total guru	38,38
D2.3	Persentase pendidik yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan/atau pembelajaran seni, dan budaya yang berdasar pendidikan dan informal	38,38
D3	Ekspresi Ketekunan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang berkegiatan atau melibatkan orang dari suku lain yang mendukung kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	71,42
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial bersama/rukun di lingkungan sekitar	87,08
D3.3	Persentase rumah tangga yang menerima/ikut kegiatan kelompok/organisasi pada/dalam/di lingkungan sekitar tempat	80,76

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Pelestari Budaya	
D4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total [illegible]	16.67
D4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total [illegible]	14.20
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah [illegible]	72.92
D4.4	Persentase penduduk yang [illegible]	84.28
D4.5	Persentase penduduk yang [illegible]	5.26
D4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan [illegible]	74.18
D5	Dimensi Kesejahteraan Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah melihat [illegible]	1.41
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	19.47
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible]	7.93
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	44.94
D6	Dimensi Budaya Lainnya	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible]	86.36
D6.2	Persentase penduduk yang [illegible]	97.28
D6.3	Persentase penduduk yang [illegible]	13.87
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki	68.36
D7.2	Rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki yang memiliki [illegible]	104.92
D7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	38.46

10. Provinsi Bulawesi Barat

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi tahun [illegible] Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	23,11
D2	Pendidikan	59,72
D3	Ketekunan Sosial Budaya	83,13
D4	Warisan Budaya	47,75
D5	Ekspresi Budaya	40,43
D6	Budaya Literasi	44,77
D7	Gender	23,21
IPK Provinsi		53,51

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat atau/pertunjukan yang pernah melihat atau/pertunjukan seni yang mendukung [illegible]	0,18
D1.2	Persentase penduduk berumur [illegible] tahun ke atas [illegible]	4,89
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible] pendidikan yang [illegible]	58,27
D2.2	Persentase guru yang [illegible]	28,28
D2.3	Persentase [illegible]	58,74
D3	Dimensi Ketekunan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase [illegible]	91,00
D3.2	Persentase [illegible]	82,91
D3.3	Persentase [illegible]	85,88

Kode	Nama indikator	Nilai
30	Dimensi Warisan Budaya	
30.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	2.70
30.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	13.03
30.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah pada dalam pergaulan sehari-hari	87.23
30.4	Persentase penduduk yang menonton seni bangunan pusaka	68.65
30.5	Persentase penduduk yang mengunjungi penggelaran seni budaya tradisional	11.31
30.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	88.11
31	Dimensi Tradisi Budaya	
31.1	Persentase penduduk yang percaya terhadap adanya pelaku penyembuhan tradisional	7.02
31.2	Persentase rumah tangga yang mempelajari ilmu tradisional	19.29
31.3	Persentase penduduk yang menghormati dukun tradisional dan/atau pemimpin adat	13.29
31.4	Persentase penduduk yang percaya akan dan ditentukan oleh [illegible] budaya [illegible] di [illegible]	81.38
32	Dimensi Budaya Lokal	
32.1	Persentase penduduk yang membaca [illegible]	98.99
32.2	Persentase penduduk yang menggunakan [illegible]	98.98
32.3	Persentase penduduk yang menganggap [illegible]	11.42
37	Dimensi Gender	
37.1	Rata-rata penduduk [illegible] terhadap [illegible]	85.00
37.2	Rata-rata penduduk [illegible] terhadap [illegible]	91.21
37.3	Rata-rata [illegible] terhadap [illegible]	21.00

31. Persentase ...

II. Provinsi Maluku

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	52.52
D2	Pendidikan	69.01
D3	Kesehatan, Sosial, Budaya	81.21
D4	Partisipasi Budaya	59.05
D5	Ekspresi Budaya	36.33
D6	Budaya Digital	55.15
D7	Gender	61.77
IPK Provinsi		**57.27**

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai penulis/pembicara pertunjukan seni yang mengadakan kontribusinya 2 sebagai narasumber pengunjung	0.35
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kegiatan barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	1.63
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase tenaga pendidikan yang memiliki sertifikat guru yang mengajar mata pelajaran budaya, bahasa, dan sejarah dan/atau muatan lokal	53.12
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal terhadap total guru	29.00
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dimensi kegiatan pelestarian dan/atau pemanfaatan seni dan budaya yang berdampak positif bagi lingkungan	63.02
D3	Dimensi Kesehatan, Sosial, Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman dari sumber air yang terlindungi di lingkungan sekitar tempat tinggal	89.24
D3.2	Persentase penduduk yang mengalami kegiatan sosial bersama/gotong royong di lingkungan sekitar	87.28
D3.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses jalan layak dan/atau jalan aspal/beton/batu di lingkungan sekitar tempat	67.14

Kode	Nama Indicator	Nilai
IV	Dimensi Warisan Budaya	
IV.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dipugar terhadap total penduduk	44.77
IV.2	Persentase warisan budaya tak benda yang telah dimajukan terhadap total penduduk	33.39
IV.3	Persentase penduduk yang mengunjungi lokasi cagar budaya di wilayah dalam kurun waktu satu tahun	67.00
IV.4	Persentase penduduk yang [illegible]	98.60
IV.5	Persentase penduduk yang [illegible]	9.03
IV.6	Persentase rumah tangga yang mengunjungi [illegible]	79.27
III	Dimensi Bhagwan Budaya	
III.1	Persentase penduduk yang pernah [illegible]	3.03
III.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	13.08
III.3	Persentase penduduk usia [illegible]	12.00
III.4	Persentase penduduk yang [illegible]	66.18
IX	Dimensi Budaya Lokal	
IX.1	Persentase penduduk yang [illegible]	45.88
IX.2	Persentase penduduk yang [illegible]	32.72
IX.3	Persentase penduduk yang [illegible]	9.17
XI	Dimensi Gender	
XI.1	Rasio [illegible]	71.43
XI.2	Rasio [illegible]	66.20
XI.3	Rasio [illegible]	15.38

D. Provinsi Bukittinggi

a. Nilai Indeks Pembangunan Keluarganya Tinggi Provinsi tertinggi Bukittinggi.

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi	11,00
D2	Pendidikan	50,91
D3	Kependudukan Sosial Budaya	79,52
D4	Perumah Budaya	87,79
D5	Dimensi Budaya	33,14
D6	Budaya Dimensi	34,87
D7	Gender	34,79
	IPK Provinsi	55,75

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Keluarganya Tinggi Provinsi.

Kode	Nama indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Keluarga	
X1.1	Presentase penduduk yang pernah [illegible] sebagai pekerja/pekerja yang [illegible] yang menjadikan [illegible] sebagai sumber penghasilan	0,00
X1.2	Presentase penduduk [illegible] yang [illegible]	2,00
D2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Presentase [illegible] pendidikan yang [illegible]	49,32
X2.2	Presentase guru yang [illegible]	20,57
X2.3	Presentase [illegible]	80,17
D3	Dimensi Kependudukan Sosial Budaya	
X3.1	Presentase rumah tangga [illegible]	84,49
X3.2	Presentase penduduk yang [illegible]	89,13
X3.3	Presentase rumah tangga yang [illegible]	87,42

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Nilai-Nilai Budaya	
D1.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	14.28
D1.2	Persentase [illegible] budaya [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	31.33
D1.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	80.07
D1.4	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	83.83
D1.5	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	14.47
D1.6	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	94.33
D2	Dimensi Ekspresi Budaya	
D2.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	2.40
D2.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	11.43
D2.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	0.00
D2.4	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	65.33
D3	Dimensi Budaya Material	
D3.1	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	46.44
D3.2	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	02.19
D3.3	Persentase [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	0.78
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	66.72
D7.2	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	66.98
D7.3	Rasio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	48.62

B. Provinsi Papua Barat

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	59,80
D2	Pendidikan	51,13
D3	Ketahanan Sosial Budaya	80,02
D4	Warisan Budaya	33,46
D5	Bahasa Budaya	38,17
D6	Budaya Literasi	47,07
D7	Gender	34,08
IPK Provinsi		47,21

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
X1	Dimensi Ekonomi Budaya	
X1.1	Pemanfaat produksi yang periode [illegible] sebagai [illegible] produksi [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	6,12
X1.2	Pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk [illegible], barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	4,77
X2	Dimensi Pendidikan	
X2.1	Pemerataan [illegible] pendidikan yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	51,30
X2.2	Proporsi guru yang mengajar [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	51,31
X2.3	Proporsi penduduk yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	51,93
X3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
X3.1	Proporsi rumah tangga yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	99,41
X3.2	Proporsi penduduk yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	60,02
X3.3	Proporsi rumah tangga yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	87,45

Kode	Faktor Indikator	Nilai
D4	Dimensi Nilai-Nilai Budaya	
D4.1	Persentase bendu, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	0.00
D4.2	Persentase nilai-nilai budaya tradisoni yang telah ditetapkan terhadap total penduduk	0.00
D4.3	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah yang dalam pergaulan sehari-hari	45.76
D4.4	Persentase penduduk yang [illegible] yang [illegible]	40.22
D4.5	Persentase penduduk yang [illegible]	0.71
D4.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	88.81
D5	Dimensi Tradisi Budaya	
D5.1	Persentase penduduk yang pernah [illegible]	0.03
D5.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	0.31
D5.3	Persentase penduduk yang [illegible]	0.19
D5.4	Persentase penduduk yang [illegible]	31.08
D6	Dimensi Budaya Literasi	
D6.1	Persentase penduduk yang [illegible]	98.78
D6.2	Persentase penduduk yang [illegible]	97.18
D6.3	Persentase penduduk yang [illegible]	4.48
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible]	72.48
D7.2	Rasio [illegible]	81.76
D7.3	Rasio [illegible]	9.28

16. Provinsi Papua Barat Daya

a. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga pada tingkat Provinsi menurut Dimensi

Kode	Nama Dimensi	Nilai
D1	Kependudukan	55.52
D2	Pendidikan	51.09
D3	Kesehatan Sosial Budaya	74.22
D4	Ketahanan Ekonomi	57.61
D5	Lingkungan Keluarga	54.32
D6	Budaya Literasi	50.06
D7	Gender	58.39
	IPK Provinsi	45.58

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Keluarganya Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Kependudukan	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melakukan [illegible] program/perkembangan pertumbuhan anak yang [illegible] [illegible]	0.00
D1.2	Persentase penduduk [illegible] [illegible]	0.21
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase [illegible] pendidikan yang [illegible] [illegible]	48.94
D2.2	Persentase [illegible]	53.08
D2.3	Persentase [illegible]	50.98
D3	Dimensi Kesehatan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase [illegible]	91.38
D3.2	Persentase [illegible]	88.14
D3.3	Persentase [illegible]	47.00

Kode	Nama Indicator	Nilai
D4	Dimensi Waktu Sekolah	
D4.1	Persentase [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible]	0.00
D4.2	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible]	0.00
D4.3	Persentase [illegible] yang [illegible] [illegible]	17.38
D4.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	59.68
D4.5	Persentase [illegible] yang [illegible]	7.41
D4.6	Persentase [illegible] yang [illegible]	75.68
D5	Dimensi Ekonomi Keluarga	
D5.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	5.55
D5.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	8.33
D5.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	7.34
D5.4	Persentase [illegible] yang [illegible]	38.26
D6	Dimensi Keluarga Lainnya	
D6.1	Persentase [illegible] yang [illegible]	47.92
D6.2	Persentase [illegible] yang [illegible]	85.37
D6.3	Persentase [illegible] yang [illegible]	5.46
D7	Dimensi Gender	
D7.1	Rasio [illegible]	88.71
D7.2	Rasio [illegible]	89.81
D7.3	Rasio [illegible]	38.87

III. Provinsi Papua

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekspresi Budaya	15,78
D2	Pendidikan	50,57
D3	Ketekunan Tradisi Budaya	77,61
D4	Warisan Budaya	44,60
D5	Dispersi Budaya	18,09
D6	Budaya Digital	61,65
D7	Gender	57,90
IPK Provinsi		**40,05**

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Domain Ekspresi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat orang pelaku/penikmat pertunjukan seni, yang mengadakan kesenilukisan, dan orang/ seniman pengrajin	0,14
D1.2	Persentase penduduk usia sekolah menengah umum/ kejuruan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total penduduk usia sekolah	0,27
D2	Domain Pendidikan	
D2.1	Persentase sekolah pendidikan yang menyediakan guru yang mengajar materi lokal, bahasa daerah, kesenian, muatan lokal lainnya	46,23
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa daerah budaya lokal terhadap total guru	55,00
D2.3	Persentase penduduk yang melihat dengan organisasi pelestari kesenian, pemanfaatan seni, dan budaya yang berdasar tradisional dan informal	54,98
D3	Domain Ketekunan Tradisi Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang masih jika ada anggotanya yang dari usia 10 yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	87,46
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	66,98
D3.3	Persentase rumah tangga yang menyisakan waktu luang bagi anggota rumah tangga untuk berpartisipasi di lingkungan sekitar tempat	58,57

Kode	Nama Indikator	Nilai
D4	Dimensi Warisan Budaya	
X4.1	Pemanfaatan bentuk, komposisi, struktur, ciri dan karakter unsur budaya yang telah dikenalkan kepadanya untuk pembelajaran	38,89
X4.2	Pemanfaatan warisan budaya tradisional yang telah dikenalkan kepadanya untuk pelestarian	8,47
X4.3	Pemanfaatan pendidikan yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam lingkungan sekitar rumah	12,84
X4.4	Pemanfaatan pendidikan yang mendorong semangat lingkungan perkampungan asli	05,37
X4.5	Pemanfaatan pendidikan yang mengajarkan pola gaya rumah/bentuk rumah	12,81
X4.6	Pemanfaatan rumah tinggal yang menggunakan produk tradisional	01,25
D5	Dimensi Bangunan Budaya	
X5.1	Pemanfaatan pendidikan yang dirancang sesuai dengan sebagai pelatih/pendidikan pertanyaan/kesan asli	3,56
X5.2	Pemanfaatan rumah tinggal yang menyiratkan nilai-nilai asli	7,06
X5.3	Pemanfaatan pendidikan yang mendukung aktivitas tradisional dan/atau pemanfaatan rotyal	8,10
X5.4	Pemanfaatan pendidikan yang memasukkan unsur dimensi asal mengangkat dimensi budaya (mengalir/produk budaya) di masing pelatih	27,21
D6	Dimensi Budaya Lokasi	
X6.1	Pemanfaatan pendidikan yang mendukung pelatih dengan nilai-nilai dasar organisasi sosial/adat	01,84
X6.2	Pemanfaatan pendidikan yang mengajarkan pancasila	05,24
X6.3	Pemanfaatan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan/keterampilan tentang budaya tempatnya	0,59
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Nilai dugaan partisipasi wanita dalam kelas pemanfaatan terhadap kelahiran	71,45
X7.2	Nilai pendidikan pemanfaatan terhadap kelahiran yang memiliki latar belakang budaya lokal	06,87
X7.3	Nilai anggaran pendidikan pemanfaatan terhadap anggaran pendidikan lokal	15,08

XI. Provinsi Papua Barat

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi menurut Domain

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	13,34
D2	Pendidikan	48,97
D3	Ketahanan Sosial Budaya	82,81
D4	Warisan Budaya	37,91
D5	Ekspresi Budaya	26,77
D6	Budaya Digital	99,95
D7	Gender	54,26
IPK Provinsi		46,33

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat atau mendengar pertunjukan seni yang menjadikan kebudayaan sebagai sumber penghasilan	0,37
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk angkutan, barang dan jasa kebudayaan terhadap total pengeluaran konsumsi	2,37
D2	Ekonomi Pendidikan	
D2.1	Persentase siswa pendidikan yang mempelajari cara yang berupaya melestari budaya lokal, bahasa daerah dan/atau simbol kesenian	49,47
D2.2	Persentase guru yang mengajar bahasa dan budaya lokal, bahasa daerah atau seni	33,67
D2.3	Persentase penduduk yang berkat dalam kegiatan pelestari budaya/bahasa pendidikan atau dan budaya yang berbeda (sekolah, dan lainnya)	99,11
D3	Ekonomi Ketahanan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang menyiapkan dan atau sebelumnya orang dari suku lain yang melestarikan kegiatan di lingkungan sekitar tinggal tinggal	92,80
D3.2	Persentase penduduk yang ditugaskan kegiatan sosial bermasyarakat di lingkungan sekitar	99,94
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible] suku lain berbeda [illegible] di lingkungan sekitar rumah	60,21

Kode	Nama indicator	Nilai
D4	Dimensi Nilai-Nilai Budaya	
X4.1	Persepsi [illegible]	0.00
X4.2	Persepsi [illegible]	0.00
X4.3	Persepsi [illegible]	10.82
X4.4	Persepsi [illegible]	41.93
X4.5	Persepsi [illegible]	9.40
X4.6	Persepsi [illegible]	35.28
D5	Dimensi Kinerja Bisnis	
X5.1	Persepsi [illegible]	3.02
X5.2	Persepsi [illegible]	8.21
X5.3	Persepsi [illegible]	13.16
X5.4	Persepsi [illegible]	36.98
D6	Dimensi Budaya Unggul	
X6.1	Persepsi [illegible]	38.46
X6.2	Persepsi [illegible]	51.97
X6.3	Persepsi [illegible]	3.77
D7	Dimensi Gender	
X7.1	Rata-rata [illegible]	72.46
X7.2	Rata-rata [illegible]	46.34
X7.3	Rata-rata [illegible]	3.38

IV. Provinsi Bangka Tengah

a. Nilai Indeks Pembangunan Ketahanan Sosial Provinsi [illegible]

Kode	Nama Domain	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi	33,04
D2	Pendidikan	45,88
D3	Infrastruktur Sosial Budaya	67,68
D4	Modernisasi Budaya	32,04
D5	Kesehatan Masyarakat	32,32
D6	Budaya Literasi	28,00
D7	Gender	53,17
	IKS Provinsi	39,48

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Ketahanan Sosial Provinsi

Kode	Nama Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mengandung interaksi/nilai sosial budaya	8,11
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa hiburan dan budaya total pengeluaran konsumsi	1,27
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh guru yang mengajar [illegible]	36,23
D2.2	Persentase guru yang mengajar hiburan dan budaya [illegible]	33,58
D2.3	Persentase penduduk yang [illegible] dalam kegiatan pendidikan dan/atau pembelajaran [illegible]	51,93
D3	Dimensi Infrastruktur Sosial Budaya	
D3.1	Persentase rumah tangga yang [illegible] dan [illegible]	73,42
D3.2	Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan sosial [illegible]	86,71
D3.3	Persentase rumah tangga yang [illegible]	

Kode	Nama Indikator	Nilai
[illegible]	Dimensi Pelestari Budaya	
[illegible]	Persentase [illegible] yang [illegible]	0,00
[illegible]	Persentase [illegible] budaya [illegible] yang [illegible]	0,00
[illegible]	Persentase penduduk yang menggunakan bahasa daerah di rumah dalam [illegible]	68,92
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	66,23
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	3,29
[illegible]	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk [illegible]	75,96
[illegible]	Dimensi Ekspresi Budaya	
[illegible]	Persentase penduduk yang pernah [illegible]	8,98
[illegible]	Persentase rumah tangga yang [illegible]	13,86
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	6,34
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	31,02
[illegible]	Dimensi Budaya Literasi	
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	37,52
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	39,97
[illegible]	Persentase penduduk yang [illegible]	1,32
[illegible]	Dimensi [illegible]	
[illegible]	Rata-[illegible] partisipasi angkatan kerja [illegible]	66,78
[illegible]	Rata-[illegible] [illegible]	79,48
[illegible]	Rata-[illegible]	0,76

28. Penilaian Aspek Pembangunan

a. Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi tahun [illegible]

Kode	Aspek Dimensi	Nilai
D1	Dimensi Budaya	77,46
D2	Pendidikan	65,03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	74,82
D4	Spiritual Budaya	33,88
D5	Ekonomi Budaya	30,41
D6	Budaya Literasi	11,41
D7	Gender	37,85
IPK Provinsi		59,83

b. Nilai Indikator Penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Provinsi

Kode	Aspek Indikator	Nilai
D1	Dimensi Ekonomi Budaya	
D1.1	Persentase penduduk yang pernah melihat sebagai pelaku/penikmat pertunjukan seni yang menjadikan interaksinya ke sebagai media penghasilan	0,34
D1.2	Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk hiburan, barang dan jasa kebudayaan selain dari konsumsi kesehatan	0,08
D2	Dimensi Pendidikan	
D2.1	Persentase rumah pendidikan yang mengintegrasi guru yang mengajar muatan lokal budaya daerah dan/atau daerah kesenian	31,71
D2.2	Persentase guru yang mengajar budaya dan budaya lokal terhadap total guru	33,96
D2.3	Persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan pelestari dan/atau pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis [illegible]	40,82
D3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	
D3.1	Persentase desa/kelurahan yang [illegible]	62,61
D3.2	Persentase penduduk yang menghormati kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	91,22

Kode	Nama Indikator	Nilai
XI.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersihan dan sanitasi pada [illegible] dari keseluruhan rumah tangga	77.50
D4	Dimensi Warisan Budaya	
XI.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah dilestarikan terhadap total potensinya	0.08
XI.2	Persentase warisan budaya takbendawi yang telah dilestarikan terhadap total potensinya	0.06
XI.3	Persentase pemanfaat yang menggunakan layanan [illegible] di rumah atau [illegible]	94.25
XI.4	Persentase pendapat yang [illegible] [illegible]	15.83
XI.5	Persentase pendapat yang [illegible] [illegible]	5.83
XI.6	Persentase rumah tangga yang [illegible]	79.07
D5	Dimensi Ekonomi Kreatif	
XI.1	Persentase pendapat yang [illegible] [illegible]	3.83
XI.2	Persentase rumah tangga yang [illegible]	13.46
XI.3	Persentase pendapat yang [illegible]	3.13
XI.4	Persentase pendapat yang [illegible]	39.33
D6	Dimensi Budaya Literasi	
XI.1	Persentase pendapat yang [illegible]	18.36
XI.2	Persentase pendapat yang [illegible]	7.30
XI.3	Persentase pendapat yang [illegible]	0.23

Kode	Nama Indikator	Nilai
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Jenderal
Biro Hukum dan Pengadaan Setjen Kemdikbud

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]